





**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Laporan Kinerja

TAHUN 2024




 021-31966163

 pttun.jakarta.go.id

 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

 pttun.jakarta@gmail.com



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2025

Pereviu I

H. Moch. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.
NIP. 195911031985031001

Pereviu II

H. Ariyanto, S.H., M.H.
NIP. 195903051986121001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Laporan Kinerja merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada tahun 2024 akan suatu lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membuat laporan kinerja ini, untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah dilakukan selama tahun 2024. Capaian kinerja diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 ini berisi tentang pencapaian indikator kinerja utama, pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan selama tahun 2024.

Akhir kata kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan datang.

Jakarta, 26 Februari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	13
C. Struktur Organisasi	16
D. Isu Strategis	18
E. Sistematika Laporan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis	22
B. Perencanaan Kinerja Tahunan	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
B. Realisasi Anggaran	110
BAB IV PENUTUP	123
LAMPIRAN 1 Reviu Ke-2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	126
LAMPIRAN 2 Reviu Ke-1 Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2024	128
LAMPIRAN 3 Reviu Ke-3 Matriks Rencana Strategis 2020-2025	131
LAMPIRAN 4 SK Tim Penyusun LkjIP Tahun 2024	135
LAMPIRAN 5 Formulir Reviu LkjIP Tahun 2024	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1 -	Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024	2
Tabel 2 -	Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan Utama	25
Tabel 3 -	Reviu Sasaran Strategis Utama dan Indikator Kinerja Utama ..	25
Tabel 4 -	Tujuan dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan	26
Tabel 5 -	Sasaran Kinerja Lain dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan ...	26
Tabel 6 -	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	31
Tabel 7 -	Indikator Kinerja Lain/Tambahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	32
Tabel 8 -	Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.....	33
Tabel 9 -	Reviu Ke-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	34
Tabel 10 -	Capaian Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024	37
Tabel 11 -	Capaian Kinerja Lainnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024	38
Tabel 12 -	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024	39
Tabel 13 -	Persentase Penyelesaian Perkara Banding Yang Diselesaikan Tepat waktu Tahun 2024	41
Tabel 14 -	Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024.....	42
Tabel 15 -	Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024	43
Tabel 16 -	Perbandingan Capaian Persentase Perkara Banding Dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024 .	43
Tabel 17 -	Perbandingan IKU 1 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024	45

Tabel 18 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1 dengan 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024	45
Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 1 PT TUN Jakarta dengan Target IKU 1 PK Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024.....	46
Tabel 20 - Efisiensi Anggaran pada IKU 1 “Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu”.....	48
Tabel 21 - Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Perkara Banding) Tahun 2024	50
Tabel 22 - Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Perkara Gugatan) Tahun 2024	50
Tabel 23 - Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024	51
Tabel 24 - Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2024.....	52
Tabel 25 - Perbandingan IKU 2 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 Dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024	53
Tabel 26 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 2 dengan 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024	54
Tabel 27 - Perbandingan Realisasi IKU 2 PT TUN Jakarta dengan Target IKU 2 PK Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024.....	55
Tabel 28 - Efisiensi Anggaran pada IKU 2 “Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi”	56
Tabel 29 - Capaian Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024.....	57
Tabel 30 - Pemantauan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	59
Tabel 31 - Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	60
Tabel 32 - Perbandingan Capaian Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 - 2024	60

Tabel 33 - Perbandingan IKU 3 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 Dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024	62
Tabel 34 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 3 dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024.....	62
Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IKU 3 PT TUN Jakarta dengan Target PK IKU 3 Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024.....	63
Tabel 36 - Efisiensi Anggaran pada IKU 3 “Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan”	65
Tabel 37 - Persentase Salinan Putusan Perkara Banding Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2024	67
Tabel 38 - Persentase Salinan Putusan Perkara Gugatan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2024	67
Tabel 39 - Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2024	68
Tabel 40 - Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024	69
Tabel 41 - Perbandingan IKU 4 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 Dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024	70
Tabel 42 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 4 dengan 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024	71
Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 4 PT TUN Jakarta dengan Target PK IKU 4 Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024.....	71
Tabel 44 - Efisiensi Anggaran pada IKU 4 “Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu”	73
Tabel 45 - Capaian Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Di bidang Teknis Yudisial Tahun 2024.....	75

Tabel 46 - Kegiatan Diklat, FGD, KK, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial.....	76
Tabel 47 - Capaian Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Tahun 2024	78
Tabel 48 - Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi.....	79
Tabel 49 - Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2024	81
Tabel 50 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2024.....	82
Tabel 51 - Capaian Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2024.....	83
Tabel 52 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2020 - 2024.....	83
Tabel 53 - Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2024	86
Tabel 54 - Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2022 - 2024	86
Tabel 55 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja PT TUN Jakarta dengan 7 (tujuh) Satker PT TUN Lainnya Tahun 2024	87
Tabel 56 - Ikhtisar Perbandingan Realisasi PT TUN Jakarta dengan Target PK Mahkamah Agung dan Target PK 7 (tujuh) Satker PT TUN Lainnya Tahun 2024	89
Tabel 57 - Ikhtisar Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan, Efisiensi Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja	92
Tabel 58 - Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024	103
Tabel 59 - Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024	104
Tabel 60 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	107

Tabel 61 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.....	109
Tabel 62 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	109
Tabel 63 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.....	110
Tabel 64 - Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024	110
Tabel 65 - Realisasi Anggaran Tahun 2024 Pada Masing-masing Sasaran Strategis	111
Tabel 66 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis ...	112
Tabel 67 - Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2024	112
Tabel 68 - Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja PT TUN Jakarta Tahun 2024	113
Tabel 69 - Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja PT TUN Jakarta Tahun 2024	113
Tabel 70 - Realisasi anggaran DIPA 01 yang mendukung Indikator Kegiatan 1 Tahun 2024	114
Tabel 71 - Realisasi anggaran DIPA 01 yang mendukung Indikator Kegiatan 2 Tahun 2024	115
Tabel 72 - Realisasi anggaran DIPA 05 yang mendukung Indikator Kegiatan 1 Tahun 2024	116
Tabel 73 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	116
Tabel 74 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	117
Tabel 75 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	117
Tabel 76 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	118

Tabel 77 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan	118
Tabel 78 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan.....	119
Tabel 79 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.....	119
Tabel 80 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	119
Tabel 81 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.....	120
Tabel 82 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.....	120
Tabel 83 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan Dan Aset	121
Tabel 84 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Dan Aset	121
Tabel 85 - Efisiensi Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024	121
Tabel 86 - Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Per Program untuk DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun 2020-2024	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Reviu Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	8
Gambar 2 - Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta..	17
Gambar 3 - Inovasi Indoput	19
Gambar 4 - Framework Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 -	Persentase Perkara Banding dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d. 2024	44
Grafik 2 -	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024.....	53
Grafik 3 -	Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024	61
Grafik 4 -	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020- 2024	69
Grafik 5 -	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024	104

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Reviu Ke-3 Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2020-2024, mempunyai visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung” dan mempunyai empat misi yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan, (2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara. (4) Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Reviu Ke-3 Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga memuat 2 (dua) sasaran strategis utama yang ingin dicapai pada periode 2020-2024, yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan memuat 4 (empat) sasaran strategis kinerja lain, yaitu (1) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan; (2) Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan; (3) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal; (4) Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyajikan informasi terkait capaian kinerja tahun 2024 dalam upaya mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga Laporan Kinerja ini merupakan media untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa skor kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 mencapai **120,64%** dinyatakan “Berhasil”, karena pada 2 (dua) sasaran strategis utama

dan 4(empat) sasaran strategis kinerja berhasil memenuhi rata-rata capaian $\geq 100\%$.

*Tabel 1 - Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		• <i>Perkara Banding</i>	100	100	100	
		• <i>Perkara Gugatan</i>	90	100	111,11	
		Rata-rata Capaian IKU 1				105,56
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
		• <i>Perkara Banding</i>	15	14,66	97,76	
		• <i>Perkara Gugatan</i>	25	31,03	124,14	
		Rata-rata Capaian IKU 2				110,95
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	91	92,25	101,37	
		Capaian IKU 3				101,37
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					105,96	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	• Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	
		• Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	
		Rata-rata Capaian IKU 4				100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					100
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100	180	180
Capaian IKL 1					180
Capaian Sasaran Strategis 3					180
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90	140	155,56
Capaian IKL 2					155,56
Capaian Sasaran Strategis 4					155,56
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	100	117,65
Capaian IKL 3					117,65
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	100	117,65
Capaian IKL 4					117,65
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5					117,65
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100	100	100
Capaian IKL 5					100
Capaian Sasaran Strategis 6					100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Utama (1,2)					102,98
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Kinerja Lain (3,4,5,6)					138,30
Capaian Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi TUN Jakarta					120,64

Untuk meningkatkan capaian-capaian target kinerja di periode mendatang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan teknologi informasi pada seluruh kegiatan dan meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut;
2. Mendorong pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas serta mampu memberikan manfaat kepada *stakeholder* dengan menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan para pemangku kepentingan;
3. Melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan diwilayah hukumnya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja melalui aplikasi *E-SAKIP* Komdanas, monitoring Bappenas PP 39, monitoring SMART;
5. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu dilakukan reviu terhadap capaian tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang secara teknis berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
3. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

8. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2024;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1504/KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024 Tentang Penunjukkan Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 16 Desember 2024;
10. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1572/KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024 Tentang Penetapan Dokumen SAKIP (Reviu Ke-1 IKU 2024, Reviu Ke-3 Renstra 2020-2024, Reviu Ke-1 PKT 2024, Reviu Ke-2 RKT 2024, Reviu Ke-1 Rencana Aksi 2024) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 23 Desember 2024;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 8 Januari 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 mengacu pada Reviu Ke-3 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024.

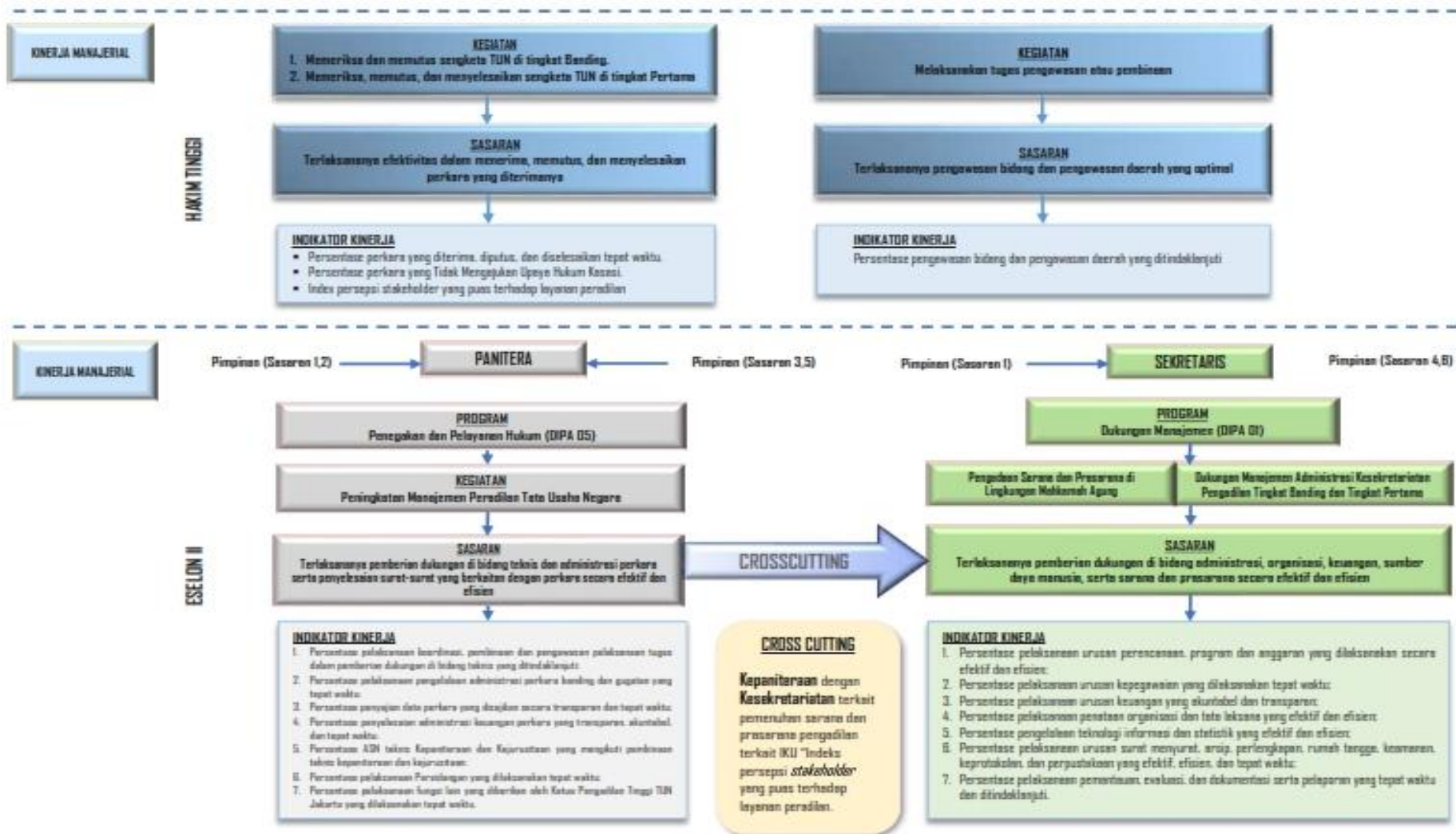
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu pertama pada tanggal 24 Februari 2023, reviu kedua pada tanggal 20 Desember 2023, reviu ketiga pada tanggal 23 Desember 2024 dan Reviu Ke-1 Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024.

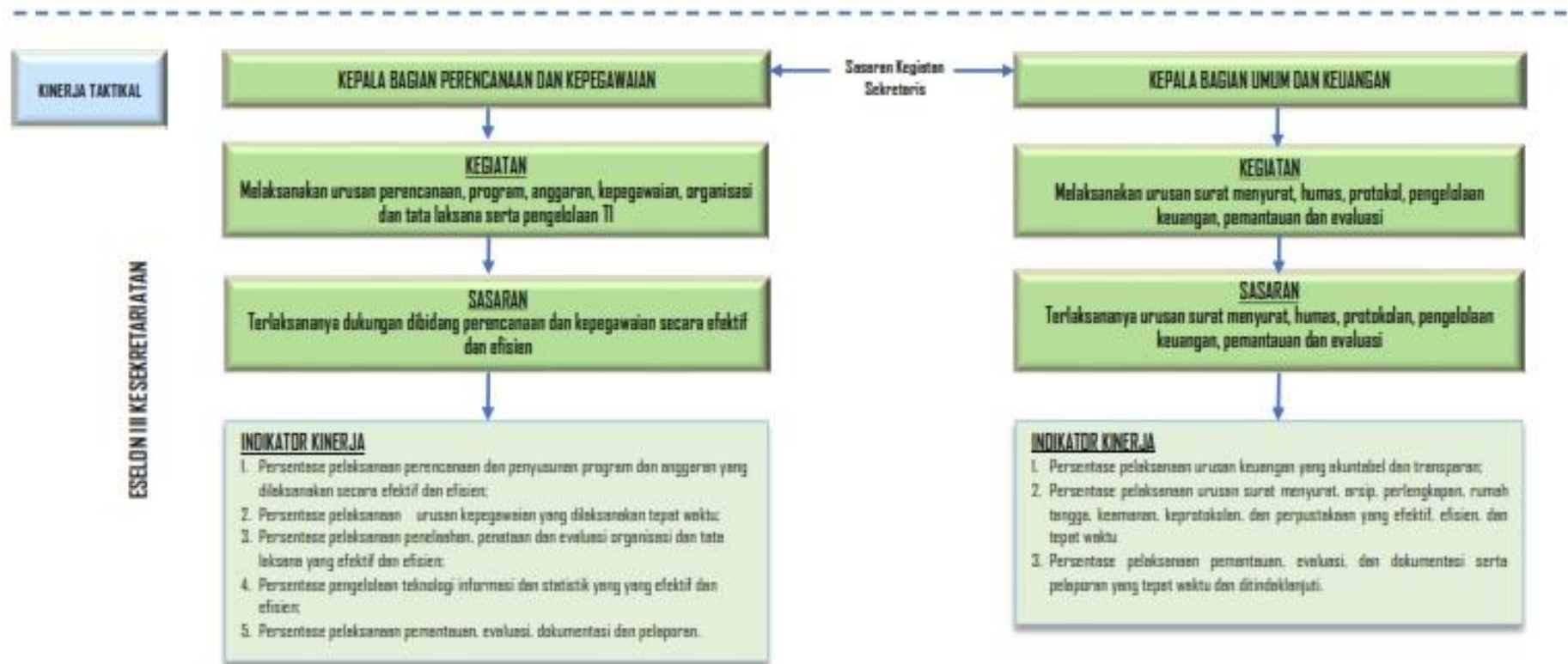
Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 ini diuraikan mengenai pencapaian indikator kinerja utama (IKU), pencapaian indikator kinerja lain, pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, realisasi anggaran dan penutup tahun 2024.

Perjenjangan kinerja yang dituangkan dalam Pohon Kinerja yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mampu menggambarkan perencanaan kinerja secara SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-Bound Goals*), sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta mempermudah penyusunan laporan kinerja.

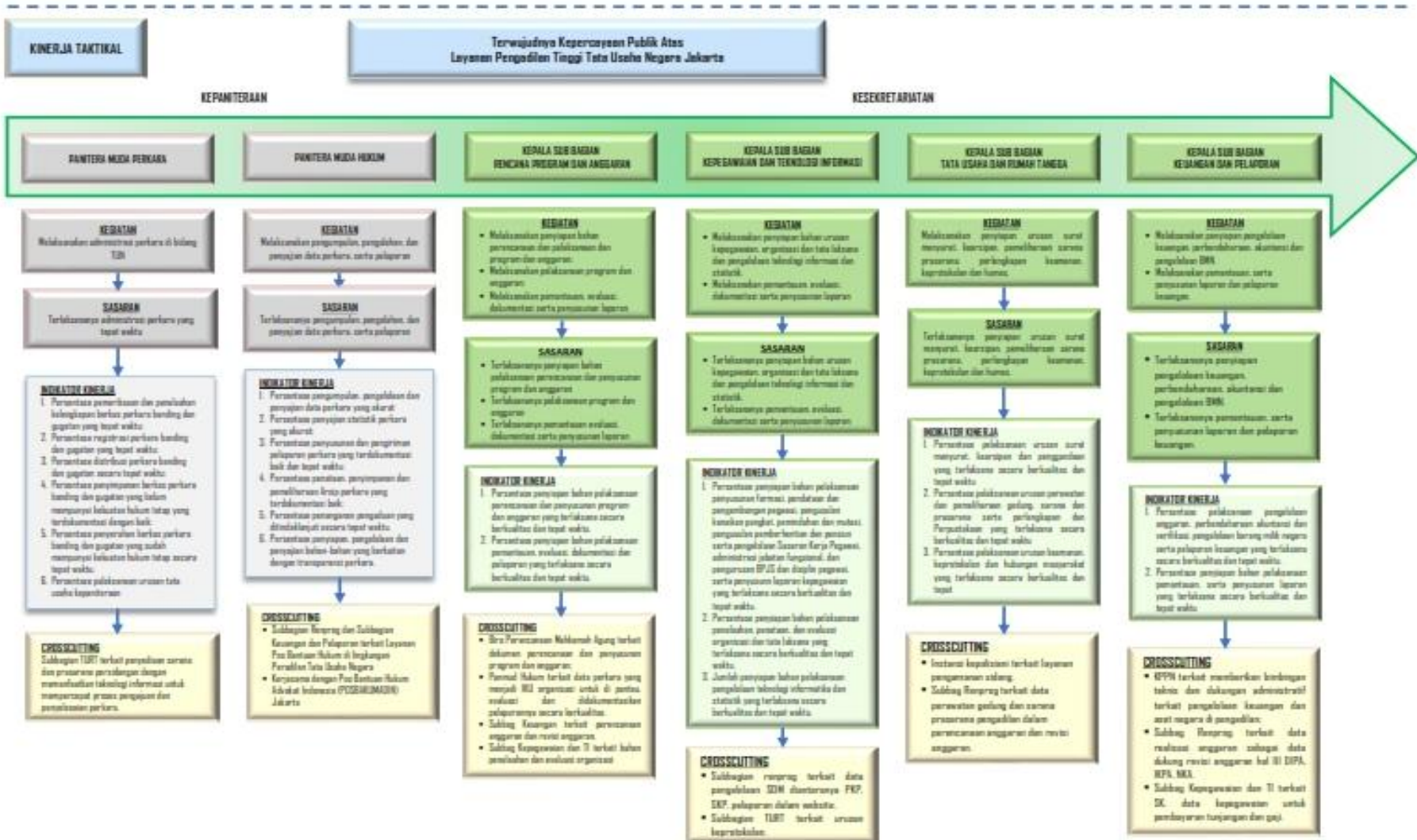
Gambar 1 – Reviu Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta







ESELON III KESEKRETARIATAN



Pohon kinerja diatas juga dijadikan acuan dalam penyusunan SKP (sasaran kerja pegawai), E-Kinerja dan PKP (penetapan kinerja pegawai) semua level unit organisasi (berjenjang) atau secara *cascading*.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi untuk turut serta mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diharapkan mampu memberikan kontribusi guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN, Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diresmikan pada tanggal 10 November 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, awal terbentuknya, membawahi 8 (delapan) wilayah propinsi yang menjadi yuridiksinya yaitu:

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Banten
4. Kalimantan Timur
5. Kalimantan Selatan
6. Kalimantan Barat
7. Kalimantan Utara
8. Kalimantan Tengah

Dari delapan propinsi tersebut masih ada satu propinsi yang belum dibentuk yaitu propinsi Kalimantan Utara sehingga sengketa yang timbul di propinsi tersebut masih dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kemudian pada akhir tahun 2022, yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami perubahan untuk pengadilan tingkat pertamanya, ini karena di wilayah Kalimantan Selatan dibentuk Pengadilan tingkat banding yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 yaitu Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Banjarmasin. Wilayah Pengadilan tingkat pertama yang mengalami pergantian tingkat bandingnya adalah:

1. Pengadilan Tata usaha Negara Banjarmasin;
2. Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Ke-4 (empat) Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, kini dibawah koordinasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi 3 (tiga) pengadilan tata usaha negara yang terdiri dari:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; dan
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sebagai instansi pemerintah, menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

a. Wewenang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai lembaga peradilan (yudikatif) yang membawahi 3 (tiga) satuan kerja yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di samping itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan:

- 1) Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini pengadilan Tinggi Tata usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama;
- 2) Sengketa yang telah melalui upaya administratif, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat pertama (Pasal 48 *jo.* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

b. Fungsi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tata usaha negara tingkat banding di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya,
- 2) Melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan diwilayah hukumnya;
- 3) Menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara;
- 4) Menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 5) Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- 6) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;

- 7) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya;
- 8) Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- 9) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan pelaporan, kepegawaian dan IT, rencana program dan anggaran); dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum tata usaha negara, pelayanan riset/penelitian.

C. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan didalam pasal 50, 51, 51A, 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

- 1) Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;
- 3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;

- 4) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- 5) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- 6) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.
- 7) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

*Gambar 2 - Struktur Organisasi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta*



D. Isu Strategis

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (Voorpost) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*Excellent Service*) bagi pencari keadilan. Sebagai *porvoost* (kawal depan) Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa mengadili perkara (upaya hukum) yang bersumber dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukumnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Jakarta, Jawa Barat dan Banten memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berlokasi di Pusat Ibukota Negara yang mana ruang lingkup perkara dan daerahnya lebih kompleks.

Terdapat dua isu strategis utama yang dihadapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2024, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara.

Peran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi

kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Selain mengeluarkan regulasi dan memperbaiki SOP yang ada, sebagai wujud aspek strategis yang dilakukan untuk mengatasi isu strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah mengembangkan Teknologi Informasi berupa inovasi, hal ini bertujuan agar mempermudah dalam pelayanan dan pencapaian kinerja. Beberapa inovasi yang telah dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

1. Indoput (Informasi Download Putusan)

Merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat menemukan dan mendownload putusan-putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan lebih cepat. Indoput merupakan bagian dari website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memuat baik putusan gugatan maupun putusan banding.

Gambar 3 – Inovasi Indoput

The infographic is titled "YUK AKSES SALINAN PUTUSAN PT TUN JAKARTA DI INDOPUT" and features the PT TUN Jakarta logo in the top right. It is divided into four steps:

- STEP 01 KUNJUNGI**: Website resmi PT TUN Jakarta di <https://www.pttun-jakarta.go.id/>. The image shows a screenshot of the website's navigation menu with "Aplikasi Internal" highlighted.
- STEP 02 ARAHKAN**: Scroll di halaman depan website, temukan "Aplikasi Internal" dan klik pilihan layanan INDOPUT. The image shows a magnifying glass over the "Aplikasi Internal" link in the menu.
- STEP 03 CARI & TEMUKAN**: Ketik nomor perkara di kolom pencarian INDOPUT untuk mendapatkan informasi dan salinan putusan. The image shows a search results table with a search bar highlighted.
- STEP 04 DOWNLOAD**: Setelah didapatkan informasi salinan putusan yang dimaksud, file dapat di download secara langsung. The image shows a download icon next to a document in the search results.

At the bottom, it says "NIKMATI KEMUDAHAN AKSES INFORMASI DAN SALINAN PUTUSAN DI APLIKASI INTERNAL PT TUN JAKARTA BERUPA INDOPUT (INFORMASI DOWNLOAD PUTUSAN)".

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini terdiri dari 4 bab yang berisi:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan dengan berpedoman kepada tugas dan fungsi, kondisi umum, visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi nasional dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sumber daya manusia untuk mencapai target kinerja dan dalam rangka pendanaan.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk sumber modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Tehnological*) atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis.

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli menuliskan, bahwa *strategic planning* adalah kegiatan yang mencakup

serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila *strategic planning* tidak mendukung inovasi dan perubahan maka itu adalah kegagalan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, terutama dalam bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan pengadilan tingkat banding yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan.

Peran pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta wajib untuk:

- Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
- Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- Berinovasi terhadap pelayanan publik.

Adapun visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI

TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam organisasi.

Tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis maka untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka dirumuskan 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi
3. Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.

Tabel 2 - Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan Utama

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu <ol style="list-style-type: none"> Perkara Banding Perkara Gugatan 	100% 90%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <ol style="list-style-type: none"> Perkara Banding Perkara Gugatan 	15% 25%
		<ul style="list-style-type: none"> Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan 	91%
2.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu 	100%

Tabel 3 - Reviu Sasaran Strategis Utama dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu <ol style="list-style-type: none"> Perkara Banding Perkara Gugatan 	100% 90%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <ol style="list-style-type: none"> Perkara Banding Perkara Gugatan 	15% 25%
		<ul style="list-style-type: none"> Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan 	91%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. 	100%

No	Sasaran Strategis Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu 	100%

Tabel 4 - Tujuan dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
		Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 	85%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan 	85%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) 	100%

Tabel 5 - Sasaran Kinerja Lain dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan

No	Sasaran Kinerja Lain/Tambahan	Indikator Kinerja Lain/Tambahan	Target 2024
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 	85%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan 	85%

No	Sasaran Kinerja Lain/Tambahan	Indikator Kinerja Lain/Tambahan	Target 2024
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) 	100%

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah:

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - 1) Perkara Banding.
 - 2) Perkara Gugatan.
- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 1) Perkara Banding.
 - 2) Perkara Gugatan.
- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah:

- Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
- Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu

Berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis tersebut, (*core business*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada sasaran strategis yang telah dituangkan melalui SK SEKMA 173 Tahun 2022:

- 1) Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Selain sasaran strategis diatas, untuk mendukung indikator kinerja utama yang telah dituangkan melalui SK SEKMA 173 Tahun 2022, terdapat sasaran kinerja lain/tambahan yang tidak tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumusan tujuan “Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima” diantaranya:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan.
 - Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
2. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.
 - Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
 - Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
 - Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.
 - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Program: Dukungan manajemen

Kegiatan 1: Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan

Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator Kegiatan: Layanan Perkantoran

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)
- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial
- Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan: Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan Peradilan.

b. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Gambar 4 - Framework Renstra 2020-2024
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

VISI: “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”			
MISI:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara 4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara 			
TUJUAN 1: Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta		TUJUAN 2 Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi	
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	
Indikator 1 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkar a Bandi ng 2. Perkara Gugatan	Indikator 2 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Perkara Banding. 2. Perkara Gugatan	Indikator 3 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indikator 1 • Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
Program 1: Program dukungan manajemen Kegiatan1: Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Indikator Kegiatan1: Layanan Perkantoran		Program 2 : Program dukungan manajemen Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kegiatan 2: Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Program 3: Program penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 3: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Indikator Kegiatan 3: Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

TUJUAN 3

Terwujudnya Pelayanan Peradilan Yang Prima

Sasaran Kinerja Lainnya:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan.
2. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

1. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya

Untuk memantau pencapaian tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan dari Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta beserta target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2020-2024. IKU Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ditopang dengan IKU tiap-tiap Sasaran Strategis yang merupakan tanggung jawab unit kerja satker pengadilan tinggi. Uraian IKU Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 - Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	100	90	90	90	100 90
		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Perkara Banding	90	50	35	35	15

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		- Perkara Gugatan					25
		3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	80	80	80	80	91
Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	4. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	100	100	100	100	100 100

Tabel 7 - Indikator Kinerja Lain/Tambahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lain/Tambahan	Target (%)		
			2023	2024	
Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100	100	
	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90	90	
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal		• Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85
			• Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85
	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	• Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100	100	

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra PT TUN Jakarta ke dalam program atau kegiatan tahunan. RKT menjadi pedoman operasional bagi satuan kerja di PT TUN Jakarta dalam menyusun Renja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan PT TUN Jakarta Tahun 2024. Dalam penetapan target kinerjanya, PT TUN Jakarta selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan PT TUN Jakarta terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra.

*Tabel 8 - Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2024
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none">Perkara BandingPerkara Gugatan	100 90
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <ul style="list-style-type: none">Perkara BandingPerkara Gugatan	15 25
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	• Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85
		• Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100

3. Perjanjian Kinerja

Tabel 9 - Reviu Ke-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Banding • Perkara Gugatan 	100 90
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Banding • Perkara Gugatan 	15 25
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	• Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85
		• Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 1.500.000.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 13.601.391.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 99.230.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2024. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2024 dinyatakan berhasil karena pada dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%. Sasaran strategis “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” capaiannya sebesar 105,96%, sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” capaiannya sebesar 100%, sasaran strategis “Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan” capaiannya sebesar 180%, sasaran strategis “Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan” capaiannya sebesar 155,56%, sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal” capaiannya sebesar 117,65%, dan sasaran strategis “Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset” capaiannya sebesar 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran strategis utama dan sasaran strategis kinerja lain dari Reviu Ke-3 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2020-2024. Analisis capaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, 2022, 2021 dan 2020;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya;
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

*Tabel 10 - Capaian Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		• <i>Perkara Banding</i>	100	100	100	
		• <i>Perkara Gugatan</i>	90	100	111,11	
		Rata-rata Capaian IKU 1				105,56
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
		▪ <i>Perkara Banding</i>	15	14,66	97,76	
		▪ <i>Perkara Gugatan</i>	25	31,03	124,14	
Rata-rata Capaian IKU 2				110,95		
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan		91	92,25	101,37		
Capaian IKU 3				101,37		
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					105,96	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	▪ Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		▪ Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100
Rata-rata Capaian IKU 4					100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 dan 2					102,98

*Tabel 11 - Capaian Kinerja Lainnya
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100	180	180
Capaian Indikator Kinerja Lain (IKL 1)					180
Capaian Sasaran Strategis 3					180
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM Non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90	140	155,56
Capaian Indikator Kinerja Lain (IKL 2)					155,56
Capaian Sasaran Strategis 4					155,56
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	100	117,65
Capaian Indikator Kinerja Lain (IKL 3)					117,65
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	100	117,65
Capaian Indikator Kinerja Lain (IKL 4)					117,65
Capaian Sasaran Strategis 5					117,65

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100	100	100
Capaian Indikator Kinerja Lain (IKL 5)					100
Capaian Sasaran Strategis 6					100
Capaian Sasaran Strategis Kinerja Lain (3,4,5,6)					138,30

*Tabel 12 - Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	95	100	105,56
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Perkara Banding - Perkara Gugatan	20	22,19	110,95
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	91	92,25	101,37
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	100	100	100
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100	180	180

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM Non Teknis Peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90	140	155,56
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	100%	117,65%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Strategis PT TUN Jakarta					120,64%

3.1. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis (SS) 1 - Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan memperoleh capaian $\geq 100\%$, dengan rincian sebagai berikut:

• Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	105,56%
• Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	110,95%
• Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	101,37%

SS 1 Indikator Kinerja Utama 1 **Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

- Perkara Banding
- Perkara Gugatan

Indikator kinerja “Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan (perkara gugatan) dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan (perkara banding) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 13 - Persentase Penyelesaian Perkara Banding Yang Diselesaikan Tepat waktu Tahun 2024

Bulan	Perkara Banding Yang Putus Tahun 2024	Perkara Banding Yang Putus Tepat waktu Tahun 2024	Realisasi Perkara Banding Yang Putus Tepat Waktu
Januari	74	74	100%
Februari	43	43	100%
Maret	131	131	100%
April	47	47	100%
Mei	14	14	100%
Juni	43	43	100%
Juli	37	37	100%
Agustus	43	43	100%
September	42	42	100%
Oktober	60	60	100%
Nopember	9	9	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	566	566	100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

*Tabel 14 - Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan
Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024*

Bulan	Perkara Gugatan Yang Putus Tahun 2024	Perkara Gugatan Yang Putus Tepat waktu Tahun 2024	Realisasi Perkara Gugatan Yang Putus Tepat Waktu
Januari	0	0	NA
Februari	3	3	100%
Maret	0	0	NA
April	2	2	100%
Mei	0	0	NA
Juni	4	4	100%
Juli	4	4	100%
Agustus	3	3	100%
September	1	1	100%
Oktober	6	6	100%
Nopember	1	1	100%
Desember	5	5	100%
Jumlah	29	29	100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Pada tahun 2024 realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, dengan jumlah perkara banding yang putus sebanyak 566 perkara dan jumlah perkara gugatan yang putus sebanyak 29 perkara dan seluruh perkara banding dan gugatan diselesaikan tepat waktu. Realisasi indikator ini, untuk perkara banding telah sesuai dengan target sebesar 100% dan perkara gugatan melebihi targetnya sebesar 90% sehingga capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 105,56%. Hasil pengukuran persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mengindikasikan kinerja PT TUN Jakarta secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 15 - Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Banding	Gugatan	Total
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	566	29	595
Jumlah perkara yang diselesaikan	566	29	595
Realisasi	100%	100%	100%
Target	100%	90%	95%
Capaian IKU 1	100%	111,11%	105,56%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Realisasi indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada PT TUN Jakarta untuk perkara banding dan gugatan pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100% dengan target perkara banding sebesar 100% dan target perkara gugatan sebesar 90% diperoleh Capaian perkara banding sebesar 100% dan capaian perkara gugatan sebesar 111,11% sehingga secara rerata IKU 1 ini memperoleh hasil capaian sebesar 105,56% dengan target rerata sebesar 95%. IKU 1, ini menunjukkan dampak hasil penyelesaian perkara secara tepat waktu demi terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

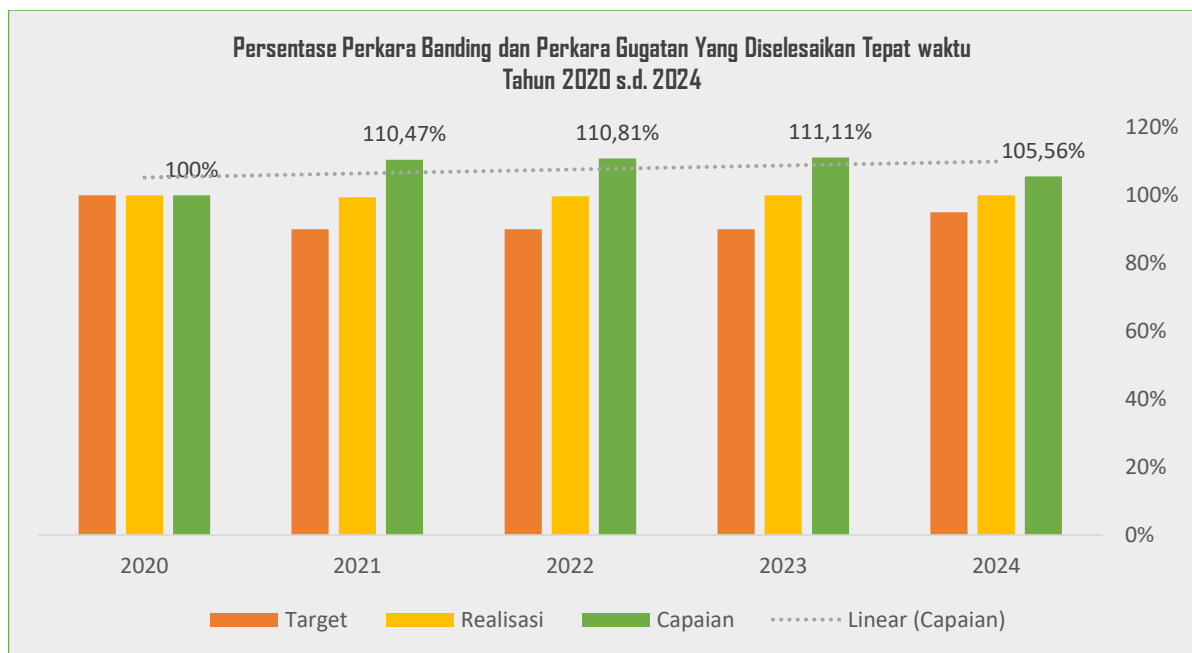
Tabel 16 - Perbandingan Capaian Persentase Perkara Banding Dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2024	595	595	95	100	105,56
	2023	349	349	90	100	111,11
	2022	382	381	90	99,73	110,81
	2021	348	346	90	99,43	110,47
	2020	331	331	100	100	100

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Realisasi IKU 1 pada tahun 2024 adalah sebesar 100% atau mencapai 105,56% dari target rerata sebesar 95%. Walaupun capaian IKU 1 menurun dari 111,11 pada tahun 2023 menjadi 105,56% pada tahun 2024, tetapi realisasinya tetap. Dengan demikian, penurunan capaian IKU 1 lebih disebabkan karena peningkatan target yang lebih tinggi dibandingkan target IKU tahun sebelumnya dan bukan disebabkan penurunan kinerja PT TUN Jakarta.

Berikut ini adalah grafik IKU 1 yang menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.



Grafik 1 - Persentase Perkara Banding dan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 17 - Perbandingan IKU 1 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

IKU 1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	90%	90%	90%	PB:100% PG:90%
Realisasi	100%	99,43%	99,73%	100%	PB:100% PG:100%
Capaian	100%	110,47%	110,82%	111,11%	PB:100% PG:111,11%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+10,47	+0,35	0,29	PB:-11,11 PG:0
Persentase Realisasi Terhadap Target Renstra (95%)	105,56%	104,66%	104,98%	105,56%	PB:105,56% PG:105,56%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Berdasarkan tabel 17 dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU 1 “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2024 dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah terpenuhi yaitu realisasi perkara banding sebesar 100% dan realisasi perkara gugatan sebesar 100% dengan target renstra sebesar 95% diperoleh capaian perkara banding sebesar 105,56% dan capaian perkara gugatan sebesar 105,56%, sehingga hasil capaian IKU ini dapat dijadikan sebagai *baseline* pada Renstra 2025-2029 PT TUN Jakarta dan pada tahun 2025 ditentukan target sebesar 95%.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Tabel 18 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1 dengan 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti,	Presentase Perkara Yang	PTTUN Jakarta	95	100	105,56
		PTTUN Medan	90	100	111,11

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Transparan Dan Akuntabel	Diselesaikan Tepat Waktu (IKU 1)	PTTUN Surabaya	90	100	111,11
		PTTUN Makassar	90	100	111,11
		PTTUN Palembang	98	100	102,04
		PTTUN Banjarmasin	95	100	105,26
		PTTUN Manado	100	100	100
		PTTUN Mataram	100	100	100

Berdasarkan tabel 18 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU 1 PT TUN Jakarta tahun 2024 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100% dan memenuhi standar antar 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya.

Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 1 PT TUN Jakarta dengan Target IKU 1 PK Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024 PT TUN Jakarta (%)	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi PT TUN Jakarta Terhadap Target Satker (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (IKU 1)	100	Mahkamah Agung	100	100
			PTTUN Jakarta	95	105,56
			PTTUN Medan	90	111,11
			PTTUN Surabaya	90	111,11
			PTTUN Makassar	90	111,11
			PTTUN Palembang	98	102,04
			PTTUN Banjarmasin	95	105,26
			PTTUN Manado	100	100
			PTTUN Mataram	100	100

Berdasarkan tabel 19 dapat disimpulkan bahwa PT TUN Jakarta telah membandingkan realisasi kinerja yang diperoleh tahun 2024 dengan target PK

Mahkamah Agung dan target PK 7 (tujuh) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya, dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa dengan realisasi IKU1 pada PT TUN Jakarta jika dibandingkan dengan target dari masing-masing satker, masih diperoleh capaian kinerja PT TUN Jakarta sebesar $\geq 100\%$. Perolehan hasil ini dapat disimpulkan bahwa IKU 1 telah memenuhi standar nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka penyelesaian perkara tepat waktu antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 5 (lima) bulan untuk perkara gugatan. Berdasarkan aturan tersebut, maka hakim, panitera, panitera pengganti bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara tepat waktu.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara:
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
 - Aplikasi e-court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
 - Aplikasi e-litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.

- Aplikasi e-Pelaporan untuk melakukan monitoring laporan perkara.
- 3. Adanya pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Pengadilan Tingkat Banding ke satker wilayah dibawahnya.
- 4. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.
- 5. Pengembangan kapasitas SDM PT TUN Jakarta untuk tenaga teknis dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan/diklat, forum group discussion (FGD), Kelompok Kerja, bimbingan teknis, dan sosialisasi.

Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Jumlah hakim yang berkurang pada tahun 2024 yakni 1 orang pensiun dibulan Mei dan 1 orang yang menggantikan meninggal dibulan September.
2. Peningkatan target yang lebih tinggi pada tahun 2024 (Perkara Banding 100%; Perkara Gugatan 90%) dari tahun 2023 sebesar 90%.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Tabel 20 - Efisiensi Anggaran pada IKU 1
"Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu"*

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	95,36	105,56	10,20

Pada tabel 20 menunjukkan realisasi anggaran sebesar 95,36% dengan capaian kinerja IKU 1 sebesar 105,56% dengan tingkat efisiensi sebesar 10,20%, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien. Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU 1 dapat terjadi karena adanya pemanfaatan teknologi informasi (*SIPP dan MIS*).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:

1. Pada awal tahun telah dilaksanakan kegiatan refleksi capaian kinerja PT TUN Jakarta bersama Satker Wilayah di Bawahnya.
2. Melakukan peningkatan kapasitas dan peran tim penilai internal agar memberikan saran perbaikan bagi unit kerja dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Menindaklanjuti hasil temuan BPK tentang proses bisnis PT TUN Jakarta.
5. Pemanfaatan teknologi informasi (SIPP dan MIS) dalam proses penyelesaian perkara
6. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

SS 1 Indikator Kinerja Utama 2

Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

- Perkara Banding
- Perkara Gugatan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding terhadap jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan pengadilan

Tabel 21 - Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
(Perkara Banding) Tahun 2024

Bulan	Perkara Yang Pustus Tahun 2024 (Perkara Banding)	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Perkara Banding)
Januari	74	32
Februari	43	0
Maret	131	51
April	47	0
Mei	14	0
Juni	43	0
Juli	37	0
Agustus	43	0
September	42	0
Oktober	60	0
November	9	0
Desember	23	0
Jumlah	566	83
Realisasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi		14,66%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Tabel 22 - Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
(Perkara Gugatan) Tahun 2024

Bulan	Perkara Yang Pustus Tahun 2024 (Perkara Gugatan)	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Perkara Gugatan)
Januari	0	0
Februari	3	3
Maret	0	0
April	2	1
Mei	0	0
Juni	4	4
Juli	4	0
Agustus	3	0
September	1	1
Oktober	6	0
November	1	0
Desember	5	0
Jumlah	29	9
Realisasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi		31,03%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Pada tahun 2024 realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (perkara banding) sebesar 14,66% dengan target sebesar 15% (reviu ke-1 PK) dan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (perkara gugatan) sebesar 31,03% dengan target PK sebesar 25%.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 23 - Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Banding	Gugatan
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83	9
Jumlah Perkara yang diselesaikan	566	29
Realisasi	14,66%	31,03%
Target	15%	25%
Capaian IKU 2	97,76%	124,14%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Realisasi indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada PT TUN Jakarta untuk perkara banding tahun 2024 dengan realisasi sebesar 14,66% dengan target perkara banding 15% diperoleh capaian 97,76% sedangkan untuk perkara gugatan tahun 2024 dengan realisasi sebesar 31,03% dengan target perkara gugatan sebesar 25% diperoleh capaian 124,14%, sehingga secara rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 110,95%. IKU 2 ini menunjukkan dampak hasil dari penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi demi terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

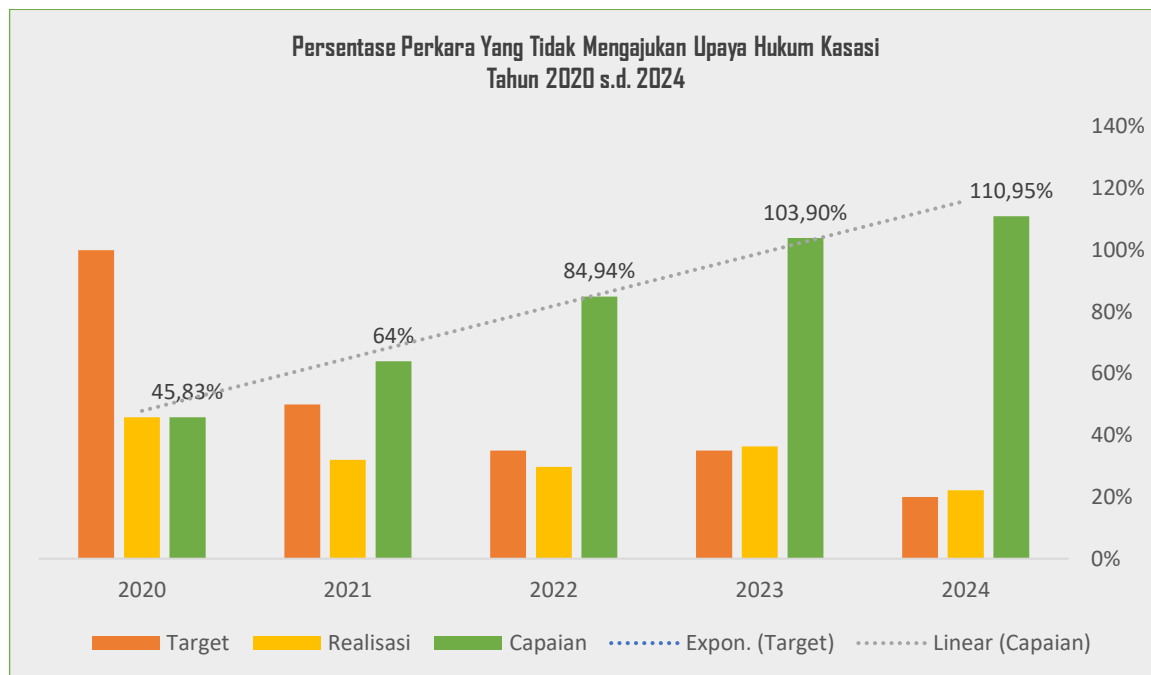
Tabel 24 - Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU 2)	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2024	20	22,19	110,95
	2023	35	36,36	103,90
	2022	35	29,73	84,94
	2021	50	32	64
	2020	100	45,83	45,83

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Realisasi IKU 2 pada tahun 2024 adalah sebesar 22,19% atau mencapai 110,95% dari target yang ditetapkan perkara banding 15% dan perkara gugatan 25% maka secara rerata target adalah sebesar 20%. Walaupun capaian IKU 2 meningkat dari 103,90% pada tahun 2023 menjadi 110,95% pada tahun 2024, tetapi realisasinya menurun. Dengan demikian, peningkatan capaian IKU 2 lebih disebabkan karena adanya reviu penurunan target dibandingkan target IKU tahun sebelumnya hal ini dikarenakan meningkatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi sehingga dalam penyelesaian perkara yang mereka jalani banyaknya pihak pencari keadilan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi.

Berikut ini adalah grafik IKU 2 yang menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.



Grafik 2 – Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024

3. Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 25 - Perbandingan IKU 2 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 Dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

IKU 2 "Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi"	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	50%	35%	35%	PB:15% PG:25%
Realisasi	45,83%	32%	29,73%	36,36%	PB:14,66% PG:31,03%
Capaian	45,83%	64%	84,94%	103,90%	PB:97,76% PG:124,14%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+ 18,17	+ 20,94	+ 18,96	PB:- 6,14 PG: + 20,24
Persentase Realisasi Terhadap Target Renstra (35%)	130,94%	91,43%	84,94%	103,89%	PB:41,88% PG:88,66%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Pada tabel 25 dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU 2 “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2024 dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 belum tercapai yakni realisasi perkara banding sebesar 14,66% dan realisasi perkara gugatan sebesar 31,03% dengan target renstra sebesar 35% diperoleh capaian perkara banding sebesar 41,88% dan capaian perkara gugatan sebesar 88,66%, sehingga hasil capaian IKU ini dapat dijadikan sebagai *baseline* pada Renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan pada tahun 2025 ditentukan target sebesar 25%.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Tabel 26 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 2 dengan 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (IKU 2)	PT TUN Jakarta	20	22,19	110,95
		PT TUN Medan	50	38,09	76,18
		PT TUN Surabaya	45	48,26	107,24
		PT TUN Makassar	30	40,67	135,57
		PT TUN Palembang	30	33,33	111,10
		PT TUN Banjarmasin	40	47,42	118,55
		PT TUN Manado	75	44,16	58,88
		PT TUN Mataram	50	52	104

Berdasarkan tabel 26 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU 2 PT TUN Jakarta tahun 2024 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100% dan memenuhi standar antar 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya.

Tabel 27 - Perbandingan Realisasi IKU 2 PT TUN Jakarta dengan Target IKU 2 PK Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024 PT TUN Jakarta (%)	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi PT TUN Jakarta Terhadap Target Satker (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (IKU 2)	22,19	Mahkamah Agung	50	44,38
			PT TUN Jakarta	20	110,95
			PT TUN Medan	50	44,38
			PT TUN Surabaya	45	49,31
			PT TUN Makassar	30	73,97
			PT TUN Palembang	30	73,97
			PT TUN Banjarmasin	40	55,48
			PT TUN Manado	75	29,59
			PT TUN Mataram	50	44,38

Berdasarkan tabel 27 dapat disimpulkan bahwa PT TUN Jakarta telah membandingkan realisasi kinerja yang diperoleh tahun 2024 dengan target PK Mahkamah Agung dan target PK 7 (tujuh) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya, dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa dengan realisasi IKU2 pada PT TUN Jakarta jika dibandingkan dengan target dari masing-masing satker, diperoleh capaian kinerja PT TUN Jakarta sebesar $\leq 100\%$. Dengan perolehan hasil ini bahwa IKU 2 belum memenuhi standar nasional. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi sehingga dalam penyelesaian perkara yang mereka jalani banyaknya pihak pencari keadilan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Faktor yang menyebabkan indikator ini tidak tercapai:

- Pada pengukuran IKU di triwulan 3, terdapat indikasi bahwa IKU untuk perkara banding tidak tercapai dikarenakan masyarakat yang berperkara memiliki kecenderungan untuk melakukan upaya hukum tertinggi sehingga temuan ini telah dirapatkan dalam forum pimpinan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 28 - Efisiensi Anggaran pada IKU 2
"Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi"

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Perkara Banding - Perkara Gugatan	95,36	110,95	15,59

Pada tabel 28 menunjukkan realisasi anggaran sebesar 95,36% dengan capaian kinerja IKU 2 sebesar 110,95% dengan tingkat efisiensi sebesar 15,29%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien. Selain itu efisiensi penggunaan sumberdaya pada IKU 2 dapat terjadi karena adanya pemanfaatan teknologi informasi (SIPP dan MIS).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:

1. Pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan refleksi capaian kinerja PT TUN Jakarta bersama Satker Wilayah Di Bawahnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Pemanfaatan teknologi informasi (SIPP, E-Lap dan MIS) dalam proses penyelesaian perkara.
4. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.
5. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

SS 1 Indikator Kinerja Utama 3

Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini mengacu pada Permenpan Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 29 - Capaian Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024

IKU 3	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	96,25	97,08	82,5	93,18
Realisasi (%)				92,25
Target (%)				91
Capaian IKU 3				101,37

Sumber data: E- Survey IKM

Berdasarkan hasil survey, realisasi indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 (skala 1-4) adalah sebesar 3,69 (Sangat Baik) atau mencapai 92,25 dari target yang ditetapkan sebesar 91% dengan capaian IKU 3 sebesar 101,37%. Ketercapaian IKU 3 mengindikasikan bahwa PT TUN Jakarta telah proaktif dalam merespon isu-isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan. Diharapkan realisasi IKU 3 dapat terus ditingkatkan sehingga target Tahun 2025 dapat dicapai.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 30 - Pemantauan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rerata
1	Persyaratan	4,00	4,00	3,30	3,74	3,76
2	Prosedur	3,90	3,90	3,27	3,71	3,70
3	Waktu Pelayanan	3,90	4,00	3,33	3,74	3,74
4	Biaya/Tarif	3,86	3,86	3,40	3,68	3,70
5	Produk Layanan	3,86	4,00	3,33	3,68	3,72
6	Kompetensi Pelaksana	3,93	3,93	3,37	3,74	3,74
7	Perilaku Pelaksana	3,86	3,86	3,33	3,81	3,72
8	Sarana dan Prasarana	3,66	3,73	3,00	3,84	3,56
9	Penanganan Pengaduan	4,00	4,00	3,37	3,61	3,75
Nilai Rata-rata		3,89	3,92	3,30	3,73	3,71
Nilai Indeks Setelah Konversi/IKM		96,25	97,08	82,50	93,18	92,25
Mutu Pelayanan		A	A	B	A	A
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber data: E- Survey IKM

Dari hasil rekapitulasi indeks rata-rata survey kepuasan masyarakat, PT TUN Jakarta mendapat nilai sebesar 92,25 dengan kategori pelayanan “Sangat Baik”. Nilai terendah terdapat pada unsur “Sarana dan Prasarana” sebesar 3,56, hal ini menggambarkan bahwa harapan masyarakat terhadap sarana dan prasarana perlu dioptimalkan. Adapun nilai tertinggi terdapat pada aspek “Persyaratan” sebesar 3,76, hal ini menggambarkan bahwa syarat

yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif telah memenuhi harapan masyarakat.

Tabel 31 - Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 32 - Perbandingan Capaian Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 - 2024

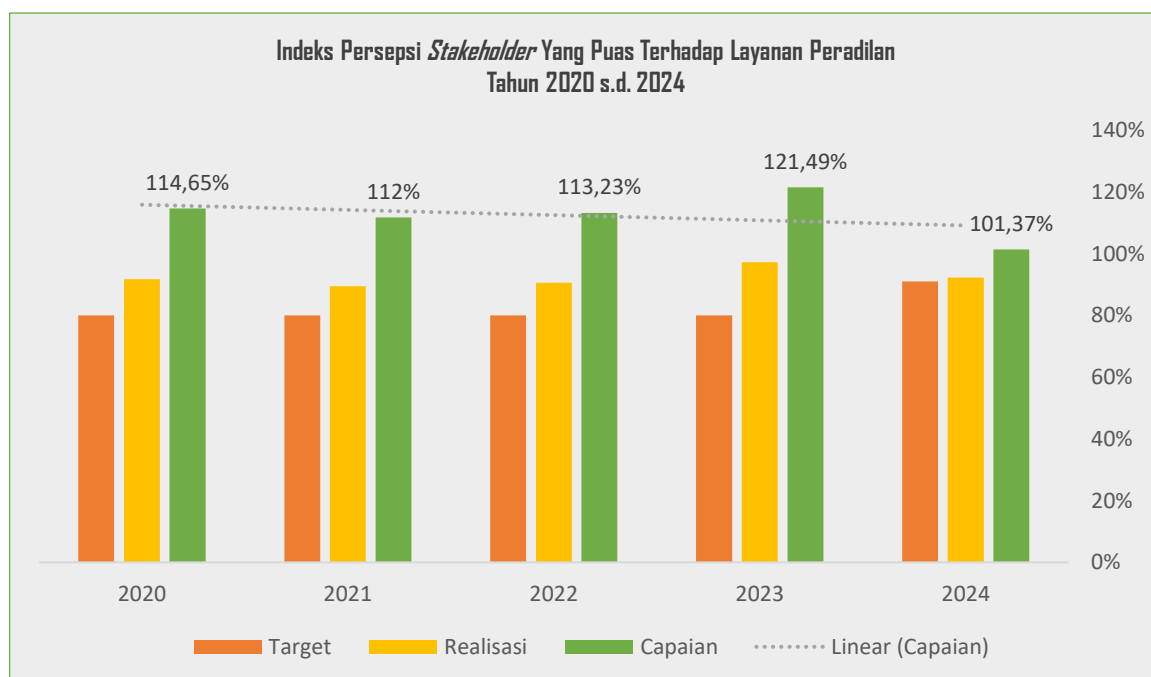
Indikator Kinerja Utama (IKU 3)	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	2024	91	92,25	101,37
	2023	80	97,19	121,49
	2022	80	90,58	113,23
	2021	80	89,41	111,76
	2020	80	91,72	114,65

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Realisasi IKU 3 pada tahun 2024 adalah sebesar 92,25% atau mencapai 101,37% dari target yang ditetapkan secara rerata sebesar 91%. Walaupun capaian IKU 3 menurun dari 121,49 pada tahun 2023 menjadi 101,37% pada tahun 2024, tetapi realisasinya mengalami tren naik. Dengan demikian, penurunan capaian IKU 3 lebih disebabkan karena peningkatan target yang lebih tinggi dibandingkan target IKU 3 tahun sebelumnya dan bukan disebabkan penurunan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pada Tabel 23 untuk kategori unsur pelayanan “Sarana Prasarana” telah mengalami peningkatan dari triwulan 3 sebesar 3,00 menjadi 3,84 di

Triwulan IV, dikarenakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan anggaran biaya tambahan (ABT) untuk penggantian sarana dan prasarana AC sentral pada ruang layanan persidangan, PTSP.

Berikut ini adalah grafik IKU 3 yang menunjukkan adanya penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya 2020-2023 dimana target IKU tetap sebesar 80%, sedangkan PT TUN Jakarta melakukan perubahan target IKU 3 sebesar 91%, hal ini dilakukan berdasarkan data histori capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga agar memenuhi kriteria menantang terhadap IKU 3 maka dilakukan perubahan target menjadi 91 dan menjadi lebih menantang karena proses perhitungan data ini tidak dilakukan secara manual lagi, namun proses survet dilakukan melalui E-Survey Dimana akan diperoleh hasilnya secara real time dan terkoneksi dengan Dirjen Badimiltun.



Grafik 3 - Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 33 - Perbandingan IKU 3 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 Dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

IKU 3 "Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan"	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80%	80%	80%	80%	91%
Realisasi	91,72%	89,41%	90,58%	97,19%	92,25%
Capaian	114,65%	111,76%	113,23%	121,49%	101,37%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-2,89	1,46	8,26	-20,11
Persentase Realisasi Terhadap Target Renstra (91%)	100,79%	98,25%	99,54%	106,80%	101,37%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Pada Tabel 33 dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU 3 “Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” pada tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 untuk IKU 3 telah terpenuhi yaitu realisasi sebesar 92,25% dengan target Renstra sebesar 91% diperoleh capaian sebesar 101,37%.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Tabel 34 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 3 dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan	PT TUN Jakarta	91	92,25	101,37
		PT TUN Surabaya	80	93,21	116,51
		PT TUN Makassar	85	94,37	111,02
		PT TUN Palembang	90	93,16	103,51
		PT TUN Banjarmasin	80	90,99	113,74

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
	peradilan (IKU 3)	PT TUN Manado	90	93,97	104,41
		PT TUN Mataram	80	83,5	104,38

Berdasarkan tabel 34 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU 3 PT TUN Jakarta tahun 2024 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100% dan memenuhi standar antar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya.

Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IKU 3 PT TUN Jakarta dengan Target PK IKU 3 Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024 PT TUN Jakarta (%)	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi PT TUN Jakarta Terhadap Target Satker (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan (IKU 3)	92,25	Mahkamah Agung	80	115,31
			PT TUN Jakarta	91	101,37
			PT TUN Medan	80	115,31
			PT TUN Surabaya	80	115,31
			PT TUN Makassar	85	108,53
			PT TUN Palembang	90	102,50
			PT TUN Banjarmasin	80	115,31
			PT TUN Manado	90	102,50
			PT TUN Mataram	80	115,31

Berdasarkan tabel 35 dapat disimpulkan bahwa PT TUN Jakarta telah membandingkan realisasi kinerja yang diperoleh tahun 2024 dengan target PK Mahkamah Agung dan target PK PT TUN lainnya, dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa dengan realisasi IKU 3 pada PT TUN Jakarta jika dibandingkan dengan target dari masing-masing satker maka diperoleh capaian kinerja PT TUN Jakarta sebesar $\geq 100\%$. Dengan perolehan hasil ini

dapat disimpulkan bahwa IKU 3 PT TUN Jakarta telah memenuhi standar nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh PT TUN Jakarta dalam rangka mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan pengadilan melalui *briefing* bimbingan teknis pemberian layanan informasi publik.
2. Permasalahan sarana dan prasarana pada tahun 2024 dimana AC sentral pada ruang persidangan, PTSP, dan ruang lantai L mengalami rusak berat sehingga mengganggu kenyamanan pengguna layanan telah ditindaklanjuti dengan mendapatkan ABT pada DIPA 01 Revisi Ke-7 untuk AC Sentral sehingga dapat terselesaikan.
3. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP.
4. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pelayanan publik.

Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja pada PT TUN Jakarta, salah satunya melalui penggunaan aplikasi terkait dengan pelaksanaan survey atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi anti korupsi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 110/DJMT/SK.TI1.1.2/VII/2024 Tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi E-Survey Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Satuan Kerja Peradilan Di Bawahnya, dimana hasilnya dapat diperoleh secara *realtime* dan dapat dimonitoring oleh pimpinan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 36 - Efisiensi Anggaran pada IKU 3
"Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan"

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	99,99	101,37	1,38

Pada tabel 36 menunjukkan realisasi anggaran sebesar 99,99% dengan capaian kinerja IKU 3 sebesar 101,37% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,38%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien. Selain itu efisiensi penggunaan sumberdaya pada IKU 2 dapat terjadi karena adanya pemanfaatan teknologi informasi, tersedianya sarana dan prasarana yang berstandar.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:

1. Kegiatan *public campaign* PT TUN Jakarta.
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja pada unit kerja, salah satunya melalui penggunaan aplikasi terkait dengan pelaksanaan survey atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi anti korupsi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 110/DJMT/SK.TI1.1.2/VII/2024 Tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi E-Survey Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Satuan Kerja Peradilan Di Bawahnya;
3. Menindaklanjuti hasil survei pengguna layanan terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana yang mempengaruhi tingkat layanan pengadilan (penggantian AC Sentral, penggantian toren, pengadaan dan perawatan pompa air, perbaikan jalur disabilitas, perawatan trafo)

Sasaran Strategis (SS) 2 - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja utama dengan hasil capaian sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%
2.	Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

SS 2 Indikator Kinerja Utama 4

- Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan yang dikirim. Pada tahun 2024 indikator ini mencapai target 100% artinya seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada tahun 2024, jumlah putusan perkara banding sebanyak 566 perkara dan sebanyak 566 perkara banding dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan jumlah putusan perkara gugatan sebanyak 29 perkara dan sebanyak 29 salinan putusannya telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Berikut tabel rincian pengiriman salinan putusan perkara banding dan perkara gugatan ke para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.

Tabel 37 - Persentase Salinan Putusan Perkara Banding Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2024

Bulan	Jumlah Salinan Perkara Banding Yang Dikirim ke Para Pihak/Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Banding Yang Dikirim ke Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Realisasi Salinan Putusan Perkara Banding
Januari	74	74	100%
Februari	43	43	100%
Maret	131	131	100%
April	47	47	100%
Mei	14	14	100%
Juni	43	43	100%
Juli	37	37	100%
Agustus	43	43	100%
September	42	42	100%
Oktober	60	60	100%
Nopember	9	9	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	566	566	100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Tabel 38 - Persentase Salinan Putusan Perkara Gugatan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2024

Bulan	Jumlah Salinan Perkara Gugatan Yang Dikirim ke Para Pihak/Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Gugatan Yang Dikirim ke Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Realisasi Salinan Putusan Perkara Banding
Januari	0	0	NA
Februari	3	3	100%
Maret	0	0	NA
April	2	2	100%
Mei	0	0	NA
Juni	4	4	100%
Juli	4	4	100%
Agustus	3	3	100%
September	1	1	100%
Oktober	6	6	100%
Nopember	1	1	100%
Desember	5	5	100%
Jumlah	29	29	100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

SS 2 Indikator Kinerja Utama 4

- **Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu;**
- **Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 39 - Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2024

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Banding	Gugatan	Total
Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	566	29	595
Jumlah Putusan Yang Dikirim	566	29	595
Realisasi	100%	100%	100%
Target	100%	100%	100%
Capaian IKU 4	100%	100%	100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

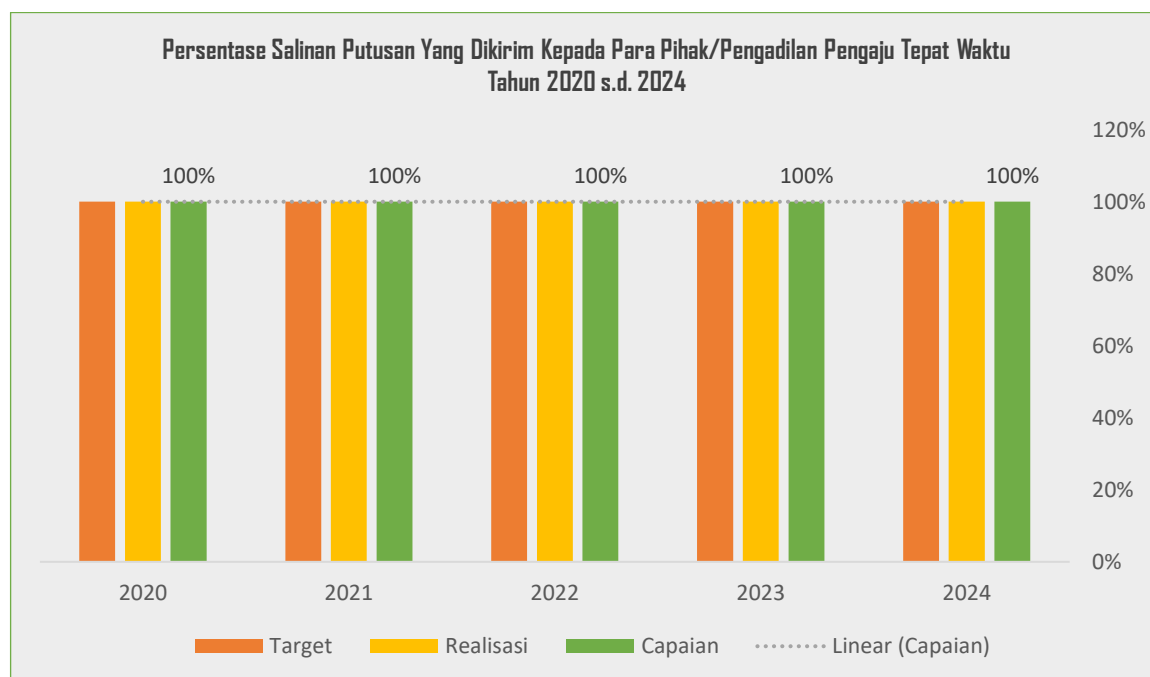
Realisasi inidikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan yang dikirim. Salinan putusan perkara banding dan gugatan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100% dengan target perkara banding dan gugatan sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sesuai dengan aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. IKU ini menunjukkan dampak hasil dari peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 40 - Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU 4)	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	595	595	100	100	100
	2023	349	349	100	100	100
	2022	382	381	100	100	100
	2021	348	346	100	100	100
	2020	331	331	100	100	100

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta



Grafik 4 - Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020- 2024

Dari tabel 40 dan grafik 4, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah perkara dari tahun sebelumnya sebanyak 70,49%, namun selama kurun waktu Renstra 2020-2024 diperoleh hasil realisasi tetap yakni sebesar 100% dengan target sebesar 100% dan capaian terhadap IKU 4 sebesar 100%, sehingga dari data ini

kedepannya pada Renstra 2025-2029 telah dilakukan perubahan target IKU 4 yang dapat menghasilkan tren naik dari setiap periode RPJM dan upaya - upaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk meningkatkan kinerja organisasinya.

4. Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 41 - Perbandingan IKU 4 Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2024 Dengan Target Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024

IKU 4 "Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu"	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	PB:100% PG:100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	PB:100% PG:100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	PB:100% PG:100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	PB:100% PG:100%
Persentase Realisasi Terhadap Target Renstra (100%)	100%	100%	100%	100%	PB:100% PG:100%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Pada tabel 41 dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU 4 “Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” pada tahun 2024 dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah tercapai yaitu realisasi perkara banding sebesar 100% dan realisasi perkara gugatan sebesar 100% dengan target renstra sebesar 100% diperoleh capaian perkara banding sebesar 100% dan capaian perkara gugatan sebesar 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Tabel 42 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 4 dengan 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu (IKU 4)	PT TUN Jakarta	100	100	100
		PT TUN Medan	90	100	111,11
		PT TUN Surabaya	90	100	111,11
		PT TUN Makassar	90	100	111,11
		PT TUN Palembang	98	100	102,04
		PT TUN Banjarmasin	95	100	105,26
		PT TUN Manado	100	100	100
		PT TUN Mataram	100	100	100

Berdasarkan tabel 42 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU 4 PT TUN Jakarta tahun 2024 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100% dan memenuhi standar antar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya.

Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 4 PT TUN Jakarta dengan Target PK IKU 4 Mahkamah Agung, Target PK 7 (tujuh) PT TUN Lainnya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024 PT TUN Jakarta (%)	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi PT TUN Jakarta Terhadap Target Satker (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju	100	Mahkamah Agung	20	500,00
			PT TUN Jakarta	100	100,00
			PT TUN Medan	90	111,11
			PT TUN Surabaya	90	111,11
			PT TUN Makassar	90	111,11
			PT TUN Palembang	98	102,04
			PT TUN Banjarmasin	95	105,26

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024 PT TUN Jakarta (%)	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi PT TUN Jakarta Terhadap Target Satker (%)
	tepat waktu (IKU 4)		PT TUN Manado	100	100,00
			PT TUN Mataram	100	100,00

Berdasarkan tabel 43 dapat disimpulkan bahwa PT TUN Jakarta telah membandingkan realisasi kinerja yang diperoleh tahun 2024 dengan target PK Mahkamah Agung dan target PK 7 (tujuh) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya, dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa dengan realisasi IKU4 pada PT TUN Jakarta jika dibandingkan dengan target dari masing-masing satker, diperoleh capaian kinerja PT TUN Jakarta sebesar $\geq 100\%$. Dengan perolehan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa IKU 4 telah memenuhi standar nasional, hal ini disebabkan karena adanya penggunaan teknologi yakni penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju terlaksana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBPN, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara:
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.

- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
 - Aplikasi e-litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan
3. Profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.
 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan.
 5. Tingkat kepatuhan input data perkara kedalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding sudah maksimal.
 6. Penetapan dan pelaksanaan SOP oleh semua Aparatur Peradilan yang proporsional.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Tabel 44 - Efisiensi Anggaran pada IKU 4
"Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu"*

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	99,77	100	0,23

Pada tabel 44 menunjukkan realisasi anggaran sebesar 99,77% dengan capaian kinerja IKU 4 sebesar 100% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,23%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien. Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU 4 dapat terjadi karena adanya pemanfaatan teknologi informasi, tersedianya sarana dan prasarana yang berstandar.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Pemanfaatan teknologi informasi (SIPP, E-Lap dan MIS) dalam proses penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kompetensi hakim dan aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara.
4. Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi.
5. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara

3.2. Analisis Capaian Kinerja Lainnya/tambahan

Sasaran Strategis 3 – Meningkatkan Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan

Sumber daya tenaga teknis merupakan sumber daya manusia dibidang peradilan yang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses yustisial. Sumber daya tenaga teknis yustisial ini meliputi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Analis Perkara Peradilan dan semuanya memiliki peranan strategis dalam menjalankan proses penanganan perkara di pengadilan. Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 180%.

- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan 180% dibidang teknis yudisial

SS 3 Indikator Kinerja Lain/tambahan (IKL 1)
Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial

Indikator kinerja “Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Dibidang Teknis Yudisial” adalah Perbandingan Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi tenaga teknis yudisial dengan Target SDM Teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi tenaga teknis yudisial dalam 1 tahun (30 orang). Capaian dari indikator kinerja persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial sebesar 180%.

Tabel 45 - Capaian Persentase SDM Teknis Yang Mempunyai Kemampuan Di bidang Teknis Yudisial Tahun 2024

Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	Diklat	FGD/KK	Bimtek	Sosialisasi
Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi tenaga teknis yudisial	0	13	26	15
Realisasi				54
Target (100%)				30
Capaian IKL 1				180%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Realisasi IKL 1 ini merupakan jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat,FGD/KK, Bimtek dan Sosialisasi teknis yudisial terhadap target SDM teknis yudisial dalam 1 tahun (30 orang, 100%), diperoleh realisasi sebesar 54 orang dengan capaian IKL 1 sebesar 180%. IKL 1 ini menunjukkan dampak hasil meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengikut sertakan dan memfasilitasi para tenaga teknis yang merupakan sumber daya manusia

dibidang teknis yudisial untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut di tahun 2024:

Tabel 46 - Kegiatan Diklat, FGD, KK, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
1.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Daring & Luring (Hotel Holiday Inn & Suites Jakarta)	5 s.d. 7 Februari 2024
2.	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Hotel Holiday Inn & Suites Jakarta	5 s.d. 7 Februari 2024
3.	FGD “Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Pegawai ASN”	Double Tree Hilton	7 s.d. 8 Maret 2024
4.	Sosialisasi Hasil Rumusan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Novotel Semarang	18 s.d. 21 April 2024
5.	Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik “Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya	Holiday Inn & Suites Jakarta	8 Mei 2024
6.	Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2023	Holiday Inn % Suites Jakarta	13 s.d. 14 Mei 2024
7.	Bimbingan Teknis Upaya Hukum Elektronik Bagi Panitera Muda Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara	Grand Orchardz Jakarta	20 s.d. 22 Mei 2024
8.	Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Standarisasi Sarana Prasarana Ruang Sidang Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Grand Orchardz Jakarta	20 s.d. 22 mei 2024
9.	Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (e-court) dan pemberkasan/minutes di Lingkungan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Hotel Horison Ultima Bekasi	20 s.d. 22 Mei 2024
10.	Bimbingan Teknis Pendalaman sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Grand Orchardz Jakarta	20 s.d. 22 Mei 2024

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
11.	Bimbingan Teknis Pendalaman Gugatan Melalui Citizen Law Suit (CSL), Class Action dan Legal Standing Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Grand Orchardz Jakarta	26 s.d. 28 Juni 2024
12.	Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan Bagi Para Panitera dan Panitera Muda Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Novotel Mangga Dua Jakarta	24 s.d. 26 Juli 2024
13.	Focus Group Discussion (FGD)	The Grove Suites By Aston Jakarta	11 Juli 2024
14.	Focus Group Discussion (FGD) Draf Naskah Dinas Akademis Status dan Kedudukan Jabatan Kepaniteraan	Mahkamah Agung	16 Agustus 2024
15.	Sosialisasi Juklak Eksekusi Putusan TUN	Mercure Nexa Bandung	22 s.d. 24 Agustus 2024
16.	Penyelesaian Sengketa Kepegawaian “Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	El Royale Hotel Bandung	22 Oktober 2024
17.	Kelompok Kerja Finalisasi Pola Karir dan Pedoman Eksaminasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Sunlake Waterfront Resort & Convention Jakarta	13 s.d. 15 November 2024
18.	Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan Lokakarya Mewujudkan Keadilan Iklim melalui Penegakan Hukum Kehutanan dan Pertambangan	Four Point by Sheraton Makassar	28 s.d. 30 November 2024
19.	Kelompok Kerja Revisi Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Luxury Inn Arion Hotel	2 s.d. 3 Desember 2024

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan IKL 1 , antara lain:

1. PT TUN Jakarta aktif mengikutsertakan dan memfasilitasi para tenaga teknis untuk dapat meningkatkan atau mengembangkan kompetensi SDM

untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pengetahuan berkelanjutan.

2. Unit teknis diharapkan memanfaatkan layanan TI (*zoom*) yang disediakan secara optimal dalam peningkatan kemampuan teknis yudisial.

Sasaran Strategis (SS) 4 – Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya kompetensi SDM Non Teknis Peradilan. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 155,56%.

- Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi, 155,56%

SS 4 Indikator Kinerja Lain/tambahan (IKL 2) Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi

Indikator kinerja “Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek Dan Sosialisasi” adalah Perbandingan Jumlah SDM Non Teknis Yang Mengikuti Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi dengan Target SDM non teknis yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi dalam 1 tahun (30 orang). Capaian dari indikator kinerja persentase sdm teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial sebesar 155,56%.

Tabel 47 - Capaian Persentase SDM Non Teknis Peradilan Yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Tahun 2024

Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	Diklat	Bimtek	Sosialisasi
Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	11	15	16
Realisasi			42
Target (90%)			30
Capaian IKL 2			155,56%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Realisasi IKL 2 ini merupakan Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat, Bimtek dan Sosialisasi terhadap target SDM non teknis dalam 1 tahun (30 orang, 90%), diperoleh realisasi sebesar 42 orang dengan capaian IKL 2 sebesar 155,56%. IKL 2 ini menunjukkan dampak hasil Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengikutsertakan dan memfasilitasi para sumber daya manusia non teknis untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut di tahun 2024:

Tabel 48 - Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
1.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Validasi NIK-NPWP melalui Pemberi Kerja	KPP Madya Jakarta	23 Januari 2024
2.	Bimbingan Teknis Pendalaman Materi "Program Perjenjangan Ahli Muda Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Daring	21 s.d. 23 Februari 2024
3.	Pelatihan Online Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik Gelombang III angkatan III	Daring	4 s.d. 8 Maret 2024
4.	Bimbingan Teknis Pengisian Capaian Output	KPPN Juanda Jakarta	23 April 2024
5.	Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Standarisasi Sarana Prasarana Ruang Sidang Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Grand Orchardz Jakarta	20 s.d. 22 Mei 2024
6.	Pelatihan Dasar Gelombang I CPNS secara blended learning kerjasama dengan LAN	Daring dan Luring	5 Juni s.d. 14 september 2024
7.	Pelatihan Manajemen ASN Gelombang II Angkatan III	Online	1 Juli s.d. 3 Agustus 2024
8.	Pelatihan Manajemen Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Online	24 s.d. 28 Juni 2024
9.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Gelombang I Angkatan I dan II oleh pusat Pembinaan	Online	24 Juni s.d. 8 Juli 2024

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Tanggal
	Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN		
10.	Kelompok Kerja Reviu Petunjuk Teknis Tata Kelola TIK Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Grand Orchardz Jakarta	26 s.d. 28 Juni 2024
11.	Bimbingan Teknis PPID bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Pengadilan Tinggi Jakarta	8 Agustus 2024
12.	Asistensi Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran DIPA 05 Tahun Anggaran 2025	Mercure Pantai Indah Kapuk	26 s.d 29 Agustus 2024
13.	E-learning Bendahara Penerimaan Angkatan Ke- VI Tahun Anggaran 2024 secara daring melalui Kemenkeu Learning Center (KLC)	Daring	12 s.d 16 Agustus 2024
14.	Sosialisasi Pengembangan Aplikasi Selintas Jaksix	KPPN Jakarta VI	3 September 2024
15.	Pembelajaran Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Gelombang I Angkatan I dan II	Badan Strajak Megamendung	24 September s.d. 2 Oktober 2024
16.	Focus Group Discussion (FGD) terhadap Pengelolaan BMN Wilayah Jakarta Di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	PTA Jakarta	9 s.d. 10 Oktober 2024
17.	Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024	Luminor Hotel Pecenongan Jakarta	31 Oktober 2024
18.	Pelatihan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pelatihan Penguatan Kompetensi Pemilihan Penyedia	Pusdiklatwas BPKP	27 Oktober s.d. 2 November 2024
19.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Novotel Mangga Dua Square	13 s.d. 15 November 2024
20.	Bimbingan teknis layanan BMN di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	PTA Jakarta	26 November 2024

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan IKL 2 , antara lain:

1. PT TUN Jakarta aktif mengikutsertakan dan memfasilitasi para tenaga non teknis untuk dapat meningkatkan atau mengembangkan kompetensi SDM untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pengetahuan berkelanjutan.
2. SDM non teknis diharapkan memanfaatkan layanan TI (zoom) yang disediakan secara optimal dalam peningkatan kemampuan kompetensinya.

Sasaran Strategis (SS) 5 – Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. Sasaran ini memiliki 2 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 117,65%.

▪ Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65%
▪ Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	117,65%

SS 5 Indikator Kinerja Lain/tambahan (IKL 3) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Tabel 49 - Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2024

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Total
Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti	11
Jumlah pengaduan yang di terima PTTUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti)	11
Realisasi	100%
Target	85%
Capaian IKL 3	117,65%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang di terima PT TUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan realisasi sebesar 100% dari target 85% sehingga capaian kinerja ini sebesar 117,65%.

Tabel 50 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Lain/Tambahan (IKL 3)	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti	2024	85	100	117,65%
	2023	85	100	117,65%
	2022	85	100	117,65%
	2021	80	100	125,00%
	2020	80	100	125,00%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Jumlah pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami trend penurunan, namun dengan persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya telah melebihi dari target yang ditentukan.

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan IKL 3 , antara lain:

1. Melakukan sosialisasi/*public campaign* kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi SIWAS untuk penyampaian pengaduan
2. Mengoptimalkan peran meja pengaduan pengadilan untuk mengakomodir para pelapor dengan menggunakan aplikasi SIWAS.
3. Menambah sarana dan prasarana pemrosesan pengaduan yang dikirim melalui pos dan surat elektronik.
4. Pembinaan dan pengawasan secara berkala
5. Standar Operasional prosedur menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan

SS 5 Indikator Kinerja Lain/tambahan (IKL 4)
Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

Tabel 51 - Capaian Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2024

Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti Dan Dipublikasikan	Total
Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	11
Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	11
Realisasi	100%
Target	85%
Capaian IKL 4	117,65%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan realisasi sebesar 100% dari target 85% sehingga capaian kinerja ini sebesar 117,65%.

Tabel 52 - Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Lain/Tambahan (IKL 4)	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan	2024	85	100	117,65%
	2023	85	100	117,65%
	2022	85	100	117,65%
	2021	80	100	125,00%
	2020	80	100	125,00%

Sumber data: Laporan bulanan data perkara pada Panmud Hukum PT TUN Jakarta

Jumlah pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami trend penurunan, namun dengan persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya telah melebihi dari target yang ditentukan.

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan IKL 4 , antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan.
2. Pembinaan dan pengawasan secara berkala.
3. Standar Operasional prosedur menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan

Sasaran Strategis (SS) 6 – Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Aset

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan hasil capaian sebesar 100%.

Bahwa dalam penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan aplikasi *e-kinerja* BKN. Orientasi Penilaian dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak hanya berkutat pada hasil kinerja dan pegawai yang bersangkutan, akan tetapi meliputi:

1. Pengembangan Kinerja Pegawai;
2. Pemenuhan Ekpektasi Pimpinan;
3. Dialog Kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pegawai;

4. Pencapaian Kinerja Organisasi; dan
5. Hasil Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai.

Proses pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang pedoman pengelolaan kinerja aparatur sipil negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Melalui Aplikasi *e-Kinerja*.

Pengelolaan kinerja pegawai terdiri dari:

1. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi espektasi;
2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai.
3. Penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai dan
4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Perencanaan kinerja pegawai terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi antara Pimpinan dan Pegawai. Penyusunan dan penetapan SKP dimulai dari Pimpinan tertinggi yang menjabarkan rencana strategis organisasi untuk kemudian dijabarkan oleh pegawai dibawahnya hingga level pegawai terendah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menentukan perencanaan kinerja pegawai harus memperhatikan hasil/manfaat/output/outcome yang akan dihasilkan oleh perencanaan kinerjanya tersebut.

-
- Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) 100%
-

SS 6 Indikator Kinerja Lain/tambahan (IKL 5)
Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)

Tabel 53 -Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2024

Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	Total
Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang “Sangat Baik”	53
Jumlah Pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (e-kinerja)	53
Realisasi	100%
Target	100%
Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) adalah perbandingan Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang “Sangat Baik” dengan Jumlah Pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (e-kinerja) dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% diperoleh capaian indikator ini sebesar 100%.

Tabel 54 - Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja Lain/Tambahan (IKL 5)	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	2024	100	100	100,00%
	2023	100	100	100,00%
	2022	100	100	100,00%

Sumber data: Laporan Bulanan Data Kepegawaian PT TUN Jakarta

Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 tetap stabil, dengan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan IKL 5 , antara lain:

1. Adanya proses penilaian, pemantauan, dan pembinaan dilaksanakan secara periodik.
2. Tingkat kepatuhan sumber daya manusia PT TUN Jakarta dalam membuat PKP (bulanan).
3. Periode evaluasi kinerja terhadap pegawai dilaksanakan secara triwulan dan tahunan.
4. Standar Operasional prosedur menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan.

Ikhtisar Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional (Antar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung)

Perhitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun sebelumnya saja, tapi capaian kinerja juga dibandingkan dengan level nasional. Adapun perbandingan capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 55 - Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja PT TUN Jakarta dengan 7 (tujuh) Satker PT TUN Lainnya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (IKU 1)	PT TUN Jakarta	95	100	105,56
		PT TUN Medan	90	100	111,11
		PT TUN Surabaya	90	100	111,11
		PT TUN Makassar	90	100	111,11
		PT TUN Palembang	98	100	102,04

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (IKU 2)	PT TUN Banjarmasin	95	100	105,26
		PT TUN Manado	100	100	100
		PT TUN Mataram	100	100	100
		PT TUN Jakarta	20	22,19	110,95
		PT TUN Medan	50	38,09	76,18
		PT TUN Surabaya	45	48,26	107,24
		PT TUN Makassar	30	40,67	135,57
		PT TUN Palembang	30	33,33	111,10
		PT TUN Banjarmasin	40	47,42	118,55
		PT TUN Manado	75	44,16	58,88
		PT TUN Mataram	50	52	104,00
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan (IKU 3)	PT TUN Jakarta	91	92,25
	PT TUN Surabaya		80	93,21	116,51
	PT TUN Makassar		85	94,37	111,02
	PT TUN Palembang		90	93,16	103,51
	PT TUN Banjarmasin		80	90,99	113,74
	PT TUN Manado		90	93,97	104,41
	PT TUN Mataram		80	83,5	104,38
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		PT TUN Jakarta	100	100
		PT TUN Medan	90	100	111,11
		PT TUN Surabaya	90	100	111,11
PT TUN Makassar		90	100	111,11	
PT TUN Palembang		98	100	102,04	
PT TUN Banjarmasin		95	100	105,26	
PT TUN Manado		100	100	100	
PT TUN Mataram		100	100	100	

Dari tabel 55 dapat dianalisa bahwa data capaian tahun 2024 pada IKU 1 untuk capaian 8 (delapan) satker PT TUN telah tercapai $\geq 100\%$ dan secara rerata targetnya antara kisaran 90% - 100%. Pada IKU 2 dengan rerata target antara 20%-75% diperoleh 6 (enam) satker PT TUN berhasil mencapai $\geq 100\%$ dan 2 satker PT TUN Medan dan PT TUN Manado tidak tercapai. Pada IKU 3 dengan rerata target antara 80% - 91% diperoleh capaian hasil $\geq 100\%$ dan pada IKU 4 dengan rerata target antara 90% - 100% diperoleh capaian hasil $\geq 100\%$. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil memenuhi target capaian $\geq 100\%$ untuk keseluruhan IKU.

Tabel 56 - Ikhtisar Perbandingan Realisasi PT TUN Jakarta dengan Target PK Mahkamah Agung dan Target PK 7 (tujuh) Satker PT TUN Lainnya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi PT TUN Jakarta (%)	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi PT TUN Jakarta Terhadap Target Satker (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (IKU 1)	100	Mahkamah Agung	100	100,00
			PT TUN Jakarta	95	105,56
			PT TUN Medan	90	111,11
			PT TUN Surabaya	90	111,11
			PT TUN Makassar	90	111,11
			PT TUN Palembang	98	102,04
			PT TUN Banjarmasin	95	105,26
			PT TUN Manado	100	100,00
			PT TUN Mataram	100	100,00
	Rerata Capaian IKU 1				105,13
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (IKU 2)	22,19	Mahkamah Agung	50	44,38
			PT TUN Jakarta	20	110,95
			PT TUN Medan	50	44,38
			PT TUN Surabaya	45	49,31
			PT TUN Makassar	30	73,97
PT TUN Palembang			30	73,97	

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi PT TUN Jakarta (%)	Satker	Target 2024 (%)	Realisasi PT TUN Jakarta Terhadap Target Satker (%)	
			PT TUN Banjarmasin	40	55,48	
			PT TUN Manado	75	29,59	
			PT TUN Mataram	50	44,38	
	Rerata Capaian IKU 2					58,49
	Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan (IKU 3)	92,25	Mahkamah Agung	80	115,31	
			PT TUN Jakarta	91	101,37	
			PT TUN Medan	80	115,31	
			PT TUN Surabaya	80	115,31	
			PT TUN Makassar	85	108,53	
			PT TUN Palembang	90	102,50	
			PT TUN Banjarmasin	80	115,31	
			PT TUN Manado	90	102,50	
			PT TUN Mataram	80	115,31	
Rerata Capaian IKU 3					110,16	
Rerata Capaian Sasaran Strategis 1					91,26	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu (IKU 4)	100	Mahkamah Agung	20	500,00	
			PT TUN Jakarta	100	100,00	
			PT TUN Medan	90	111,11	
			PT TUN Surabaya	90	111,11	
			PT TUN Makassar	90	111,11	
			PT TUN Palembang	98	102,04	
			PT TUN Banjarmasin	95	105,26	
			PT TUN Manado	100	100,00	
			PT TUN Mataram	100	100,00	
			Rerata Capaian IKU 4			
Rerata Capaian Sasaran Strategis 2					148,96	
Rerata Capaian Sasaran Strategis 1 dan 2					105,69	

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan perbandingan realisasi kinerja yang diperoleh Tahun 2024 dengan target PK Mahkamah Agung, dan 7 (tujuh) satker PT TUN lainnya, adapun hasilnya ditunjukkan pada tabel 56 dan dapat disimpulkan pada IKU 1 diperoleh capaian $\geq 100\%$, pada IKU 2 dengan realisasi PT TUN Jakarta, capaiannya tidak penuh yakni sekitar 44,38% - 73,97%, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi sehingga dalam penyelesaian perkara yang mereka jalani melakukan upaya hukum yang lebih tinggi. Pada IKU 3 diperoleh capaian $\geq 100\%$ yakni sebesar 101,37% - 115,31% dan pada IKU 4 diperoleh capaian antara 100% - 500%.

Pada data tabel 56 untuk Sasaran Strategis I “Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” rerata capaian sebesar 91,26% dan Capaian Sasaran Strategis II sebesar 148,96% sehingga rata-rata total capaian kinerja sasaran strategis I dan II sebesar 105,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil meraih capaian kinerja organisasi diatas 100% dan memenuhi target standar nasional.

Tabel 57 - Ikhtisar Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan, Efisiensi Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	95%
		Realisasi	100%
		Capaian	105,56%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	<p>Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100%</p> <p>Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 5 (lima) bulan untuk perkara gugatan. Dengan aturan ini, maka Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara tepat waktu. 2. Melakukan pemantauan terhadap IKU secara berkala, dan jika ditemukan target tidak tercapai dilakukan perubahan target perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring berkala. 3. Adanya keterlibatan Pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat bulanan dan peran hakim pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara. 4. Adanya pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang. 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara. 6. Adanya standar operasional prosedur (SOP) jangka waktu penyelesaian perkara.

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
			<p>7. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.</p> <p>8. Pengembangan kapasitas SDM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk tenaga teknis dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan/diklat, forum group discussion (FGD), Kelompok Kerja, bimbingan teknis, dan sosialisasi.</p>
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKU 1 sebesar 95,36%; Capaian Kinerja sebesar 105,56% dengan tingkat efisiensi sebesar 10,20%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	<p>Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan refleksi capaian kinerja PT TUN Jakarta bersama Satker Wilayah Di Bawahnya. 2. Melakukan peningkatan kapasitas dan peran tim penilai internal agar memberikan saran perbaikan bagi unit kerja dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. 4. Menindaklanjuti hasil temuan BPK tentang proses bisnis PT TUN Jakarta. 5. Pemanfaatan teknologi informasi (SIPP dan MIS) dalam proses penyelesaian perkara 6. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
		Target	20%

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi	22,19%
		Capaian	110,95%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	<p>Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 22,19% dengan penjelasan target:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Banding (15%) dengan realisasi 14,66% - Perkara Gugatan (25%) dengan realisasi 31,03% <p>Faktor yang menyebabkan indikator ini tidak tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pengukuran IKU di triwulan 3, terdapat indikasi bahwa IKU untuk perkara banding tidak tercapai dikarenakan masyarakat yang berperkara memiliki kecenderungan untuk melakukan upaya hukum tertinggi sehingga temuan ini telah dirapatkan dalam forum pimpinan <p>Solusi yang dilakukan:</p> <p>Pada IKU ini berdasarkan hasil rapat telah diputuskan untuk perkara banding diturunkan menjadi 15% dan perkara gugatan 25% (tetap) secara rerata target menjadi (20%)</p>
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKU 2 sebesar 95,36%; Capaian Kinerja sebesar 110,95% dengan tingkat efisiensi sebesar 15,59%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	<p>Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan refleksi capaian kinerja PT TUN Jakarta bersama Satker Wilayah Di Bawahnya. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. 		

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan teknologi informasi (SIPP, E-Lap dan MIS) dalam proses penyelesaian perkara. 4. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara. 5. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara
	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Target	91%
		Realisasi	92,25%
		Capaian	101,37%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	<p>Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 92,25%</p> <p>Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan pengadilan melalui briefing bimbingan teknis pemberian layanan informasi publik. 2. Adanya ABT untuk kebutuhan/perbaikan sarana dan prasarana peradilan dapat meningkatkan kepuasan publik/masyarakat. 3. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP. 4. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pelayanan publik. 5. Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja pada PT TUN Jakarta, salah satunya melalui penggunaan aplikasi

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
			terkait dengan pelaksanaan survey atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKU 3 sebesar 99,99%; Capaian Kinerja sebesar 101,37% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,38%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	<p>Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan <i>public campaign</i> PT TUN Jakarta. 2. Pemanfaatan teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja pada unit kerja, salah satunya melalui penggunaan aplikasi terkait dengan pelaksanaan survey atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi anti korupsi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 110/DJMT/SK.TI1.1.2/VII/2024 Tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi E-Survey Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Satuan Kerja Peradilan Di Bawahnya; 3. Menindaklanjuti hasil survei pengguna layanan terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah. 4. Pengelolaan sarana dan prasarana yang mempengaruhi tingkat layanan pengadilan (pergantian AC Sentral, pergantian toren, pengadaan dan perawatan pompa air, perbaikan jalur disabilitas, perawatan trafo)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan	Target	100%
		Realisasi	100%
		Capaian	100%
		Analisis Penyebab Keberhasilan	Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100%

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
	pengaju tepat waktu	/Kegagalan	<p>Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju terlaksana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBK, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. 2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan 4. Tingkat kepatuhan input data perkara kedalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding sudah maksimal. 5. Penetapan dan pelaksanaan SOP oleh semua Aparatur Peradilan yang proporsional.
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKU 4 sebesar 99,77%; Capaian Kinerja sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,23%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	<p>Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Pemanfaatan teknologi informasi (SIPP, E-Lap dan MIS) dalam proses penyelesaian perkara. 3. Peningkatan kompetensi hakim dan aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara. 4. Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi.

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
			5. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	Target	30
		Realisasi (100%)	54
		Capaian	180%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 54 orang Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini: 1. PT TUN Jakarta aktif mengikutsertakan dan memfasilitasi para tenaga teknis untuk dapat meningkatkan atau mengembangkan kompetensi SDM untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pengetahuan berkelanjutan. 2. Unit teknis diharapkan memanfaatkan layanan TI (zoom) yang disediakan secara optimal dalam peningkatan kemampuan teknis yudisial.
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKL 1 sebesar 97,69%; Capaian Kinerja sebesar 180% dengan tingkat efisiensi sebesar 82,31%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
			<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pengusulan bimtek, diklat, FGD, sosialisasi terhadap SDM teknis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik secara daring dan luring. Mengadakan bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah PTTUN Jakarta
Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	Target	30
		Realisasi (90%)	42
		Capaian	155,56%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	<p>Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 42 orang</p> <p>Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT TUN Jakarta aktif mengikutsertakan dan memfasilitasi para tenaga non teknis untuk dapat meningkatkan atau mengembangkan kompetensi SDM untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pengetahuan berkelanjutan. SDM non teknis diharapkan memanfaatkan layanan TI (zoom) yang disediakan secara optimal dalam peningkatan kemampuan kompetensinya.
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKL 2 sebesar 93,18%; Capaian Kinerja sebesar 155,56% dengan tingkat efisiensi sebesar 62,38%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	<p>Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pengusulan bimtek, diklat, FGD, sosialisasi terhadap SDM non teknis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik secara daring dan luring.
		Target	85%

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Realisasi	100%
		Capaian	117,65%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100%. Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi/<i>public campaign</i> kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi SIWAS untuk penyampaian pengaduan Mengoptimalkan peran meja pengaduan pengadilan untuk mengakomodir para pelapor dengan menggunakan aplikasi SIWAS. Menambah sarana dan prasarana pemrosesan pengaduan yang dikirim melalui pos dan surat elektronik. Pembinaan dan pengawasan secara berkala Standar operasional prosedur menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan.
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKL 3 sebesar 93,18%; Capaian Kinerja sebesar 117,65% dengan tingkat efisiensi sebesar 24,47%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini: <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peran meja pengaduan pengadilan untuk mengakomodir para pelapor dengan menggunakan aplikasi SIWAS. Menambah sarana dan prasarana pemrosesan pengaduan yang dikirim melalui pos dan surat elektronik. Sosialisasi/<i>public campaign</i> kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi SIWAS untuk penyampaian pengaduan. Perbaikan dan percepatan pelayanan bagi <i>stakeholders</i> dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	Target	85%
		Realisasi	100%
		Capaian	117,65%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100%. Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan. 2. Pembinaan dan pengawasan secara berkala 3. Standar Operasional prosedur menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan.
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKL 4 sebesar 99,99%; Capaian Kinerja sebesar 117,65% dengan tingkat efisiensi sebesar 17,66%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan. 2. Mengoptimalkan peran meja pengaduan pengadilan untuk mengakomodir para pelapor dengan menggunakan aplikasi SIWAS. 3. Menambah sarana dan prasarana pemrosesan pengaduan yang dikirim melalui pos dan surat elektronik. 4. Sosialisasi/public campaign kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi SIWAS untuk penyampaian pengaduan.

Sasaran	Indikator	Aspek	Analisis
Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)		Perbaiki dan percepatan pelayanan bagi <i>stakeholders</i> dengan pemanfaatan teknologi informasi.
		Target	100%
		Realisasi	100%
		Capaian	100%
		Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	Indikator kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi sebesar 100%. Strategi yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini: <ol style="list-style-type: none"> Adanya proses penilaian, pemantauan, dan pembinaan dilaksanakan secara periodik. Tingkat kepatuhan sumber daya manusia PT TUN Jakarta dalam membuat PKP (bulanan) Periode evaluasi kinerja terhadap pegawai dilaksanakan secara triwulan dan tahunan Standar Operasional prosedur menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan.
		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Realisasi Anggaran IKL 5 sebesar 95,36%; Capaian Kinerja sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,64%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.
		Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	Program/kegiatan yang telah dilaksanakan PT TUN Jakarta selama Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian kinerja ini: <ol style="list-style-type: none"> Adanya proses penilaian, pemantauan dan pembinaan dilaksanakan secara periodik. Seluruh pegawai diwajibkan mengisi capaian kinerja melalui aplikasi e-Kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yakni “Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” dan “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya program/ kegiatan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa efisiensi penggunaan anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi, diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Upaya efisiensi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diukur dari evaluasi kinerja anggaran dengan melandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut mengharuskan entitas Pemerintah dan Lembaga negara untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Salah satu aspek yang diukur dalam Evaluasi Kinerja Anggaran adalah tingkat efisiensi.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian penyerapan anggaran dengan capaian keluaran. Penjelasan tentang pengukuran efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 58 - Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024

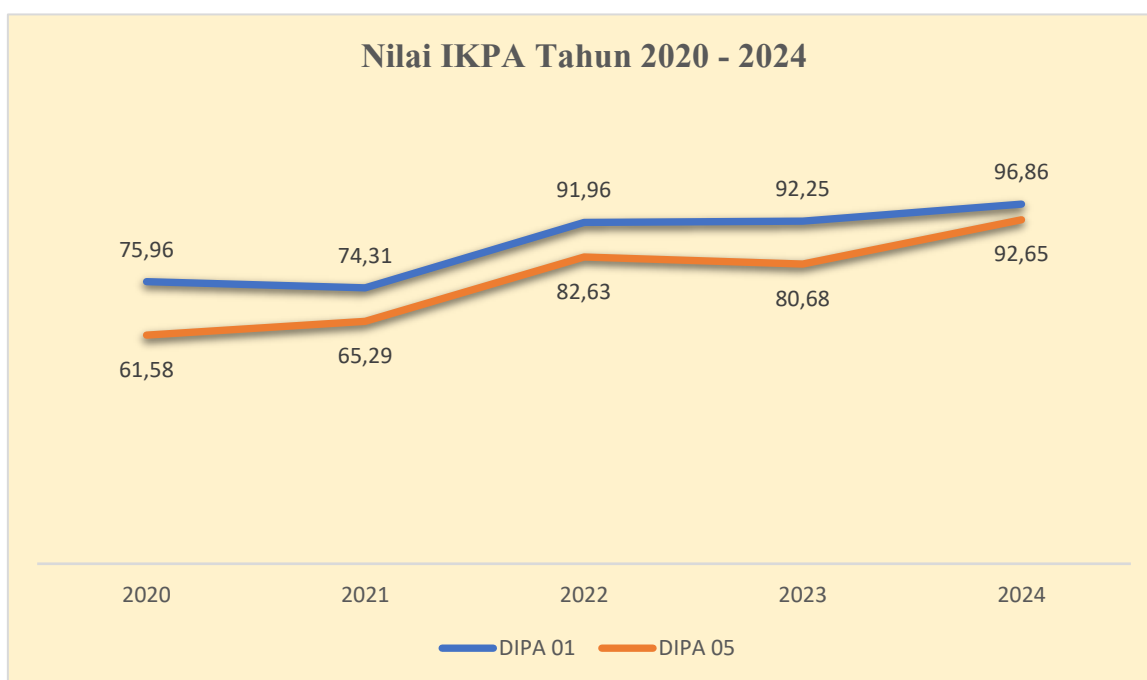
Anggaran	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
DIPA 01	75,00	96,86	85,93	Baik
DIPA 05	75,00	92,65	83,83	Baik

Berdasarkan tabel 58 Nilai Kinerja Anggaran PT TUN Jakarta Tahun 2024, untuk DIPA 01 adalah sebesar 85,93 dan DIPA 05 adalah sebesar 83,83 dengan kategori “Baik”.

Tabel 59 - Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024

Anggaran	2020	2021	2022	2023	2024
DIPA 01	75,96	74,31	91,96	92,25	96,86
DIPA 05	61,58	65,29	82,63	80,68	92,65

Berdasarkan tabel 59 Nilai IKPA PT TUN Jakarta Tahun 2024, untuk DIPA 01 adalah sebesar 96,86 dan DIPA 05 adalah sebesar 92,65. Dapat disimpulkan bahwa untuk nilai IKPA DIPA 01 dikategorikan “Sangat Baik” dan untuk nilai IKPA DIPA 05 dikategorikan “Baik”.



Grafik 5 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024

Grafik 5 menunjukkan perbandingan Nilai IKPA PT TUN Jakarta tahun 2020-2024 untuk DIPA 01 dan DIPA 05 menunjukkan tren naik tiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian keuangan dalam pelaksanaan anggarannya sesuai dengan program kerja PT TUN Jakarta.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran antara lain:

- a. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran kegiatan yang telah tercantum pada DIPA/POK satker.
- b. Memantau perkembangan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN dan SMART DJA, agar dapat segera menentukan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja.
- c. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Dirjen Badimiltun, Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Agung dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

2. Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa aplikasi tersebut antara lain:

- (1) Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP), sebagai penyimpan database seluruh pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
- (2) Aplikasi E-Kinerja
- (3) Aplikasi Komdanas MA-RI
- (4) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan;
- (5) Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP;
- (6) Aplikasi *e-court* yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara

secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

- (7) Aplikasi *e-litigasi* yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan;
- (8) Aplikasi e-Pelaporan untuk melakukan monitoring laporan perkara
- (9) Layanan Penganggaran (SAKTI), yang memudahkan pengelolaan keuangan
- (10) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE), yang mempersingkat waktu proses pengadaan barang dan jasa.
- (11) Layanan Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR) yang memudahkan proses pemantauan implementasi SAKIP.
- (12) Elektronik Integrated Planning System (E-IPLANS)
- (13) Aplikasi e-BIMA (*Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*), merupakan aplikasi untuk memonitoring pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan di Mahkamah Agung dan Satker dibawahnya.
- (14) Aplikasi e-Sadewa (*Electronic State Asset Development And Enhancement Work Application*).
- (15) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), aplikasi berbasis web untuk melakukan monitoring pengelolaan keuangan negara.

Keberadaan beberapa aplikasi tersebut diatas dapat memberikan gambaran pelaksanaan internal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, PT TUN Jakarta melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja, PT TUN Jakarta berusaha untuk

konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada stakeholder dan para pencari keadilan melalui tindak lanjut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

1. Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Evaluator PT TUN Jakarta.
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PT TUN Jakarta oleh Badan Pengawasan.

Hasil evaluasi SAKIP PT TUN Jakarta tahun 2022 dan 2023 oleh Badan Pengawasan diperoleh nilai sebagai berikut:

*Tabel 60 - Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta*

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	18,00	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18,00	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	7,80	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			57,55	70,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC "Cukup"	BB "Sangat Baik"

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PT TUN Jakarta pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Pimpinan dan keterlibatan seluruh unit kerja dalam melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawasan atas penilaian SAKIP PT TUN Jakarta Tahun 2022. Beberapa kendala atau hambatan terkait pencapaian target kinerja pada tahun 2023 tersebut antara lain:

- a. Penyusunan perjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengimplementasikan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*.

- b. Penetapan target pada PK belum sepenuhnya memperhatikan kondisi capaian terkini sehingga target yang ditetapkan kurang menantang.
- c. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja.
- d. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keputusan strategis di periode berikutnya.
- e. Perlunya penajaman kualitas catatan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- f. Proses evaluasi SAKIP internal terhadap satker wilayah belum dilakukan pendalaman terhadap data dukung dan tindak lanjut hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh tim evaluator agar dapat terlihat implementasi secara nyata.
- g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM memadai.

Upaya yang telah dilakukan oleh PT TUN Jakarta atas kendala atau hambatan pada tahun sebelumnya antara lain:

- a. Penajaman penyusunan *cascading* kinerja satker berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.
- b. Telah dilakukan reviu oleh tim evaluator reviu yang tertuang dalam laporan reviu pada perjanjian kinerja Tahun 2024, dimana terdapat penyesuaian target kinerja yang lebih rendah dari pada target sebelumnya berdasarkan hasil pengukuran capaian pada tahun berjalan. Terhadap perubahan tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap seluruh dokumen perencanaan.
- c. Penetapan target pada PK tahun mendatang dan Renstra 2025-2029 telah melibatkan unsur Pimpinan dan keterlibatan seluruh unit kerja.
- d. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja.
- e. Informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keputusan strategis di periode berikutnya.

- f. Adanya penajaman kualitas catatan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022.
 - g. Evaluasi SAKIP telah dilakukan secara mendalam terhadap satker wilayah dibawah PT TUN Jakarta. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2023.
 - h. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai dimana para tim evaluator telah dibekali dengan bimbingan teknis mengenai SAKIP.
3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Wilayah PT TUN Jakarta oleh Tim Evaluator PT TUN Jakarta.
- Hasil evaluasi SAKIP Satker Wilayah PT TUN Jakarta tahun 2022 dan 2023 diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 61 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,6	21,0
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,4	21,0
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75	10,8
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,5	17,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,2	70,3
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB "Sangat Baik"	BB "Sangat Baik"

Tabel 62 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,6	21,6
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,9	21,9
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,5	10,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,25	18,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,2	72,2
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB "Sangat Baik"	BB "Sangat Baik"

Tabel 63 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,2	24,0
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,6	22,5
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	10,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,25	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,3	75,8
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB "Sangat Baik"	BB "Sangat Baik"

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan pagu awal DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 15.818.091.000 (Lima belas milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan DIPA 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebesar Rp 99.230.000 (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran maka anggaran tersebut direvisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 - Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Pagu Revisi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
1	Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen	Rp 15.101.391.000	Rp 14.469.493.870	95,82%	Rp 631.897.130	4,18%
2	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 99.230.000	Rp 99.004.897	99,77%	Rp 225.103	0,23%
Jumlah		Rp 15.200.621.000	Rp 14.568.498.767	95,84%	Rp 632.122.233	4,16%

Realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai Rp 14.568.498.767 (Empat belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau

sebesar 95,84% dari total alokasi yaitu Rp 15.200.621.000 (Lima belas milyar dua ratus juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Program penegakan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh PT TUN Jakarta dengan alokasi masing-masing sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 65 - Realisasi Anggaran Tahun 2024 Pada Masing-masing Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	15.101.391.000	14.469.493.870	95,82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	99.230.000	99.004.897	99,77
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	118.710.000	115.971.385	97,69
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	36.880.000	34.366.485	93,18
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	82.410.000	79.893.485	96,95
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	13.601.391.000	12.969.643.870	95,36

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 memuat 6 (enam) sasaran strategis dengan anggaran sesuai dengan matrik renstra 2020-2024. Penyerapan anggaran tersebut perlu diukur agar tidak melebihi anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut sehingga efisiensi dari penggunaan anggaran atas kinerja tersebut dapat terlaksana.

Tabel 66 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	95,82%	105,96%	10,14%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	99,77%	100%	0,23%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	97,69%	180%	82,31%
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	93,18%	155,56%	62,38%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	96,95%	117,65%	20,7%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	95,36%	100%	4,64%

Seluruh kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel 67 - Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
Program Dukungan Manajemen	15.101.391.000	14.469.493.870	95,82	631.897.130	4,18
• Dukungan manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	13.601.391.000	12.969.643.870	95,36	631.747.130	4,64
• Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.500.000.000	1.499.850.000	99,99	150.000	0,01
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	99.230.000	99.004.897	99,77	225.103	0,23
• Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	99.230.000	99.004.897	99,77	225.103	0,23

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 15.101.391.000 (Lima belas milyar seratus satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang meliputi:

1. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 10.441.629.000 (Sepuluh milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan.

2. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang tahun 2024 sebesar Rp. 3.159.762.000 (Tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, jasa dan perjalanan dinas.

3. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 68 - Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja PT TUN Jakarta Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
Belanja Pegawai	10.441.629.000	9.957.167.951	95,36	484.461.049	4,64
Belanja Barang	3.159.762.000	3.012.475.919	95,34	147.286.081	4,66
Belanja Modal	1.500.000.000	1.499.850.000	99,99	150.000	0,01

Sumber data: Satu DJA

Tabel 69 - Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja PT TUN Jakarta Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
Belanja Barang	99.230.000	99.004.897	99,77	225.103	0,23

Sumber data: Satu DJA

Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan manajemen

Kegiatan 1: Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator Kegiatan: Layanan Perkantoran

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)
- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial
- Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Program dan Kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA 01 BUA sebesar Rp 13.601.391.000, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 70 - Realisasi anggaran DIPA 01 yang mendukung Indikator Kegiatan 1 Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
Layanan Dukungan Manajemen Internal					
Layanan Perkantoran	13.601.391.000	12.969.643.870	95,36	631.747.130	4,64
▪ Gaji dan Tunjangan	10.441.629.000	9.957.167.951	95,36	484.461.049	4,64
▪ Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.159.762.000	3.012.475.919	95,34	147.286.081	4,66

Sumber data: Satu DJA

Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan: Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan Peradilan.

Program dan Kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA 01 BUA sebesar Rp 1.500.000.000, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 71 - Realisasi anggaran DIPA 01 yang mendukung Indikator Kegiatan 2 Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
Layanan Sarana Internal	1.500.000.000	1.499.850.000	99,99	150.000	0,01

Sumber data: Satu DJA

2. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Program dan Kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 99.230.000, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 72 - Realisasi anggaran DIPA 05 yang mendukung Indikator Kegiatan 1 Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
Belanja Barang:	99.230.000	99.004.897	99,77	225.103	0,23
Koordinasi	45.530.000	45.527.000	99,99	3.000	0,01
▪ Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	25.530.000	25.527.000	99,99	3.000	99,99
▪ Dukungan Penyelesaian Perkara Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20.000.000	20.000.000	100	0	100
Sosialisasi dan Diseminasi	36.300.000	36.077.900	99,39	222.100	99,39
Sosialisasi/Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara	36.300.000	36.077.900	99,39	222.100	99,39
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	17.400.000	17.399.997	100	3	0
Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	17.400.000	17.399.997	100	3	0

Sumber data: Satu DJA

Tabel 73 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.01.WA Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Perkara Banding - Perkara Gugatan	Layanan Perkantoran	13.601.391.000	12.969.643.870	95,36
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Layanan Sarana Internal	1.500.000.000	1.499.850.000	99,99
Total Realisasi Anggaran				15.101.391.000	14.469.493.870	95,82

Realisasi anggaran pada IKU 1 dan IKU 2 sebesar 95,36% dan IKU 3 sebesar 99,99%. Realisasi anggaran pada Sasaran Strategis “Terwujudnya Pengadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” sebesar 95,82%

Tabel 74 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	95,36	105,56	10,20
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Perkara Banding - Perkara Gugatan	95,36	110,95	15,59
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	99,99	101,37	1,38

Capaian kinerja pada IKU 1 sebesar 105,56% dengan realisasi anggaran sebesar 95,36% sehingga terjadi efisiensi sebesar 10,20%. Capaian kinerja pada IKU 2 sebesar 110,95% dengan realisasi anggaran sebesar 95,36% sehingga terjadi efisiensi sebesar 15,59% dan Capaian kinerja pada IKU 3 sebesar 101,37% dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,38%

Tabel 75 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.05.BF	Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	99.230.000	99.004.897	99,77
		- Perkara Banding	Koordinasi	45.530.000	45.527.000	99,99
		- Perkara Gugatan	Sosialisasi dan Diseminasi	36.300.000	36.077.900	99,39
			Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	17.400.000	17.399.997	100
Total Realisasi Anggaran				99.230.000	99.004.897	99,77

Realisasi anggaran pada IKU 4 dengan Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar 99,77%.

Tabel 76 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	99,77	100	0,23

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,77% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,23%.

Tabel 77 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.01.WA						
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	Pembinaan dan Pengawasan	36.880.000	34.366.485	93,18
005.05.BF						
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		Koordinasi	45.530.000	45.527.000	99,99
			Sosialisasi	36.300.000	36.077.900	99,39
Total Realisasi Anggaran				118.710.000	115.971.385	97,69

Realisasi anggaran pada IKL 1 dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan” sebesar 97,69%.

Tabel 78 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	97,69	180%	82,31%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan” sebesar 180% dengan realisasi anggaran sebesar 97,69% sehingga terjadi efisiensi sebesar 82,31%.

Tabel 79 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.01.WA						
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	Pembinaan dan Pengawasan	36.880.000	34.366.485	93,18
Total Realisasi Anggaran				36.880.000	34.366.485	93,18

Realisasi anggaran pada IKL 2 dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan” sebesar 93,18%.

Tabel 80 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	93,18	155,56	62,38

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan” sebesar 155,56% dengan realisasi anggaran sebesar 93,18% sehingga terjadi efisiensi sebesar 62,38%.

Tabel 81 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.01.WA						
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Pembinaan dan Pengawasan	36.880.000	34.366.485	93,18
005.05.BF						
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	Koordinasi	45.530.000	45.527.000	99,99
Total Realisasi Anggaran				82.410.000	79.893.485	96,95

Realisasi anggaran pada IKL 3 dan IKL 4 dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal” sebesar 96,95%.

Tabel 82 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	93,18	117,65	24,47
2.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	99,99	117,65	17,66

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal” sebesar 117,65% dengan realisasi anggaran sebesar 96,95% sehingga terjadi efisiensi sebesar 20,70%.

*Tabel 83 - Realisasi Anggaran Pada Sasaran
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan Dan Aset*

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.01.WA	Dukungan Manajemen	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	Layanan Perkantoran	13.601.391.000	12.969.643.870	95,36
Total Realisasi Anggaran				13.601.391.000	12.969.643.870	95,36

Realisasi anggaran pada IKL 5 dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset” sebesar 95,36%.

*Tabel 84 - Efisiensi Anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
Keuangan, Dan Aset*

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1.	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	95,36	100	4,64

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset” sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 95,36% sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,64%.

*Tabel 85 - Efisiensi Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Tahun 2024*

Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
15.200.621.000	14.568.498.767	95,84	120,64	24,80

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar 120,64% lebih tinggi jika

dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 95,84% sehingga terjadi efisiensi sebesar 24,80%.

Tabel 86 - Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Per Program untuk DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun 2020-2024

No	Program dan Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen					
	Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	98,63%	94,28%	93,83%	95,79%	95,36%
	Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	99,97%	99,99%	100,00%	99,91%	99,99%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
	Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	94,23%	88,48%	91,80%	97,48%	99,77%

Dari perincian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran DIPA 01 maupun anggaran DIPA 05 untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 nilai realisasi anggarannya dapat dikatakan baik dikarenakan presentase yang didapatkan adalah melebihi dari angka 90%. Hal ini dapat terwujud dikarenakan pengoptimalan anggaran yang tidak terpakai segera di revisi untuk anggaran yang dapat terserap.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 yang diolah berdasarkan analisa pengukuran capaian indikator kinerja, bahwa pada tahun 2024 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk program kerja tahun 2024 dipandang baik walaupun belum sempurna. Usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran diantaranya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada hasil yang akan di dapat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja PT TUN Jakarta tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban PT TUN Jakarta kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang menyajikan gambaran atas pencapaian target kinerja pada tingkat organisasi dan unit kerja. PT TUN Jakarta telah menerapkan manajemen kinerja organisasi sepanjang pelaksanaan proses bisnisnya. Manajemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis dalam mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang diamanatkan dalam Renstra PT TUN Jakarta 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja PT TUN Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja PT TUN Jakarta Tahun 2024 adalah sebesar 120,64% dengan uraian realisasi dari setiap IKU dan IKL adalah sebagai berikut:

1. Realisasi IKU 1 - Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 105,56% sedangkan targetnya adalah 95%, sehingga capaiannya adalah 105,56%;
2. Realisasi IKU 2 - Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 22,19% sedangkan targetnya adalah 20%, sehingga capaiannya adalah 110,95%;
3. Realisasi IKU 3 - Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan adalah sebesar 92,25% sedangkan targetnya adalah 91%, sehingga capaiannya adalah 101,37%;

4. Realisasi IKL 1 - Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial adalah sebesar 180% sedangkan targetnya adalah 100%, sehingga capaiannya adalah 180%;
5. Realisasi IKL 2 - Persentase SDM Non Teknis Peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi adalah sebesar 140% sedangkan targetnya adalah 90%, sehingga capaiannya adalah 155,56%;
6. Realisasi IKL 3 - Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah sebesar 100% sedangkan targetnya adalah 85%, sehingga capaiannya adalah 117,65%;
7. Realisasi IKL 4 - Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah sebesar 100% sedangkan targetnya adalah 85%, sehingga capaiannya adalah 117,65%;
8. Realisasi IKL 5 - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) adalah sebesar 100% sedangkan targetnya adalah 100%, sehingga capaiannya adalah 100%.

Capaian kinerja PT TUN Jakarta Tahun 2024 tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran senilai Rp 14.568.498.767 atau sebesar 95,84% dari pagu anggaran yang dialokasikan senilai Rp 15.200.621.000.

Dalam upaya mendorong pencapaian sasaran strategis dan target kinerja PT TUN Jakarta Tahun 2024, PT TUN Jakarta menghadapi kendala berikut ini:

1. PT TUN Jakarta belum memiliki aplikasi yang menghubungkan capaian kinerja organisasi dengan SIPP di website PT yang dapat memudahkan monitoring baik internal dan eksternal, sehingga kesalahan input dapat di minimalisir dan transparansi dapat diwujudkan.
2. Adanya keterbatasan jumlah hakim pada PT TUN Jakarta belum berimbang dengan peningkatan volume perkara yang ditangani sebesar 79% dari tahun sebelumnya.
3. Keterbatasan jumlah SDM pada unit kesekretariatan sehingga adanya rangkap jabatan sehingga berdampak kepada kualitas pekerjaan.

4. Keterbatasan anggaran sarana dan prasarana berdampak pada layanan pengadilan.

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Memberikan perhatian pada isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti untuk mendorong percepatan “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”.
2. Penguatan produktivitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Perbaikan pada aspek layanan, tata kelola dan penyediaan informasi publik.
4. Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala dan didokumentasikan secara resmi sehingga dapat menjadi sistem pengendalian dalam pemantauan kinerja.
5. Penerapan budaya kerja BerAKHLAK dalam pelaksanaan kinerja organisasi.
6. Mengembangkan kapasitas SDM di PT TUN Jakarta sebagai bagian dari pengembangan kapasitas organisasi dengan cara mengikut sertakan SDM dalam berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi dan asistensi, baik secara internal (Mahkamah Agung, Dirjen, Satker Wilayah) dan eksternal (Kemenkeu, BKN, Kepolisian).
7. Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kinerja.

LAMPIRAN 1

REVIU KE-2 RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	100% 90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	15% 25%
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	91%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi.	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

Jakarta, 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

LAMPIRAN 2

REVIU KE-1 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

-1-

REVIU KE -1 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MARSEKAL MUDA TNI DR. YUWONO AGUNG NUGROHO,
S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
Dan Peradilan Tata Usaha Negara


Marsekal Muda TNI
DR. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 525775

Jakarta, 20 Desember 2024
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta


H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

REVIU KE-1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

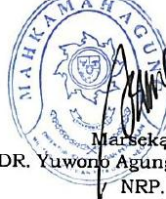
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 90% 15% 25% 91%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. b. Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	100% 100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi.	90%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 1.500.000.000
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 13.601.391.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 99.230.000

Jakarta, 20 Desember 2024

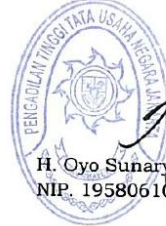
Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
Dan Peradilan Tata Usaha Negara



Marskhal Muda TNI

DR. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 525775

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

LAMPIRAN 3
REVIU Ke-3 MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Instansi : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung
 Misi : 1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan
 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
 4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No	Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Terwujudnya pengadilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	100	90	90	90		Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan perkantoran	1 layanan	13.601.391.000
				- Perkara Banding - Perkara Gugatan						100 90					
				Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:	35%	100	50	35	35		Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan	Layanan perkantoran	1 layanan	13.601.391.000

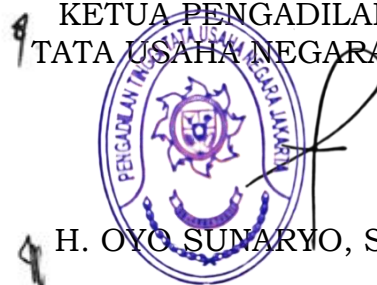
No	Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
				- Perkara Banding - Perkara Gugatan						15 25		Tingkat Pertama			
				Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91	80	80	80	80	91	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1.500.000.000
2.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100	100	100	100		Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi dan Sosialisasi dan Diseminasi - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	3 Kegiatan	45.530.000
				Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu						100				8 orang	36.300.000
				Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim pihak/pengadilan pengaju tepat waktu						100				48 orang	17.400.000

No	Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%	80%	85%	90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	- Pembinaan dan pengawasan		36.880.000
												Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi - Sosialisasi dan Diseminasi		45.530.000
												Program Penegakan dan Pelayanan Umum			
			Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	90%	80%	80%	85%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Pembinaan dan Pengawasan		36.880.000
			Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	80%	80%	85%	85%	85%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan	Pembinaan dan pengawasan		36.880.000

No	Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
			secara optimal									Tingkat Pertama			
				Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	70%	75%	85%	85%	85%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara	Koordinasi	3 Keg	45.530.000
			Peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan perkantoran	1 layanan	13.601.391.000	

Jakarta, 23 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 4
SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
TAHUN 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 83 /KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/1/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) .
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

KETIGA.....

- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025 .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2025

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
 Nomor : 83 /KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/1/2025
 Tanggal : 8 Januari 2025

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Penanggung Jawab	:	Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H
2.	Koordinator Validasi Data	:	Hj. SITTI RAHMATIAH, S.H.,M.H
3.	Ketua	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
4.	Sekretaris	:	ONO HARYONO, S.E
5.	Anggota	:	1. SUMARTANTO, S.H.,M.H. 2. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 3. DARUL NAPIS, S.H 4. ELLY SETIO WARDANI, S.H 5. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 6. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E 7. IIS YULITA TRSINAWATI K, S.E 8. NITUYU MENDROFA, S.H 9. FIRMANSYAH, S.H 10. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 11. WINDA KARTIKA SOBAR, A.Md 12. NURUL FARADHILAH, S.H 13. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 14. SANTI GUSTIANI, S.E 15. FARHANUM MILATIN NISA', S.H 16. MUHAMMAD ALIFIAN GERALDI FAUZI, S.H. 17. SARI MEILISNA, A.Md 18. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.M.d
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	:	1. H. MOCH. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. 2. H. ARIYANTO, S.H.,M.H.

Ketua
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH
 NIP. 19580610 198503 1 001

**TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO.	JABATAN	:	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	:	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2.	Koordinator Validasi Data	:	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	:	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	:	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	:	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis Indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	:	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas .

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001

LAMPIRAN 5

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	PERNYATAAN	CHECK LIST
1.	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓2. Lkj telah menyajikan informasi target kinerja ✓3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓
2.	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj ✓4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja ✓5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART	√ √ √ √ √ √ √ √ √

Jakarta, 24 Februari 2025

Pereviu I

Pereviu II




H. Moch. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.
NIP. 195911031985031001

H. Ariyanto, S.H. M.H.
NIP. 195903051986121001

